



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

# Laporan Kinerja

Kanwil DJKN Kalimantan  
Selatan dan Tengah

# 2025

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga kepada kami semua di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, sehingga kami beserta segenap jajaran dapat mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab, serta dapat meraih target yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah pada tahun 2025 adalah sebesar 113,19%. Angka pencapaian ini bukan semata sebagai bukti prestasi dari unit kerja namun juga merupakan cerminan dari adanya sinergi dan kolaborasi dengan tetap menjaga akuntabilitas dan integritas untuk pelayanan terbaik. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, telah dilakukan secara bulanan sebagai bentuk komitmen atas perbaikan dan perubahan serta merupakan usaha maksimal dalam upaya mitigasi atas kegiatan pengelolaan kinerja organisasi.

Berbagai prestasi dan penghargaan juga kembali diperoleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada periode tahun 2025. Hal ini tentu menjadi pemacu semangat bagi Kanwil Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah untuk terus meningkatkan kinerja terbaiknya. Sampai dengan saat ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah tetap berkomitmen guna menjaga keberlanjutan implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan terus menegakkan Nilai-Nilai dan Budaya Kementerian Keuangan serta Kode Etik ASN, demi masa depan terbaik generasi muda penerus bangsa Indonesia 2045.

Sebagai penutup, kami seluruh jajaran di lingkup Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas sinergi, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik internal ataupun eksternal selama tahun 2025. Semoga konsistensi, komitmen, sinergi dan kolaborasi bersama berlandaskan akuntabilitas dan integritas dapat terus kita tegakan bersama.

Banjarbaru, 3 Februari 2025  
Kepala Kantor




Ditandatangani secara elektronik  
Tetik Fajar Ruwandri





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi	8
BAB II RENCANA KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi 2025	26
Dukungan untuk Program Prioritas Presiden	70
B. Realisasi Anggaran	74
C. Analisa atas Efisiensi Sumber Daya	78
D. Kinerja Lain-lain	81
BAB IV PENUTUP .....	103

The background features a dynamic composition of overlapping geometric shapes in shades of blue, orange, and yellow. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement. A prominent diagonal line separates the upper orange and yellow areas from the lower blue area. The overall aesthetic is modern and energetic.

Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

An illustration featuring two blue hands holding a yellow scroll with a green band. The background is a gradient of orange and blue. The number '01.' is prominently displayed in white.

# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, agar lebih efektif dan efisien maka dibentuk unit-unit vertikal DJKN di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki wilayah kerja yang mencakup 3 unit kantor pelayanan yaitu KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin. Sebagai instansi pemerintah, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## **B. Tugas dan Fungsi**

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Untuk mendukung tugas tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
3. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
6. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa;
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, setiap bagian/bidang pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, memiliki tugas sebagai berikut:

### **1. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis



beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

3. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, pengagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

4. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

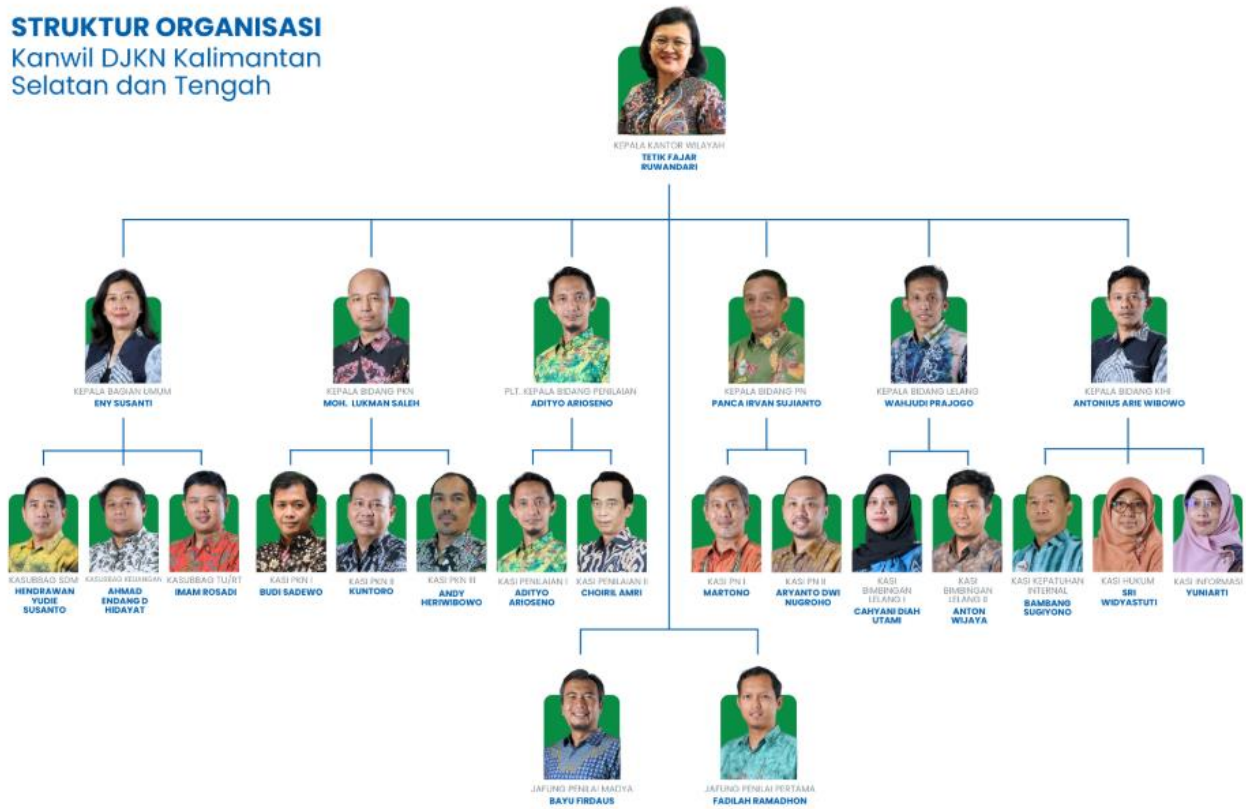
6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyediaan bahan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.



### C. Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah



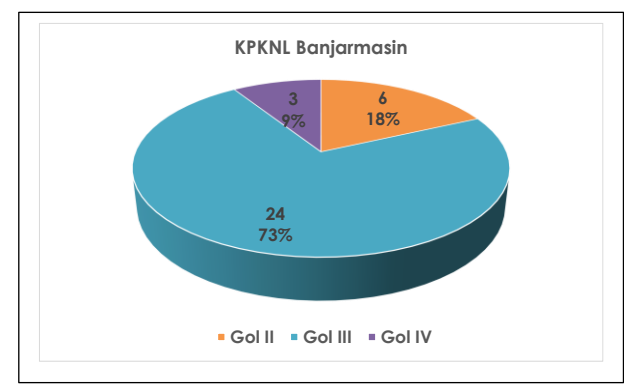
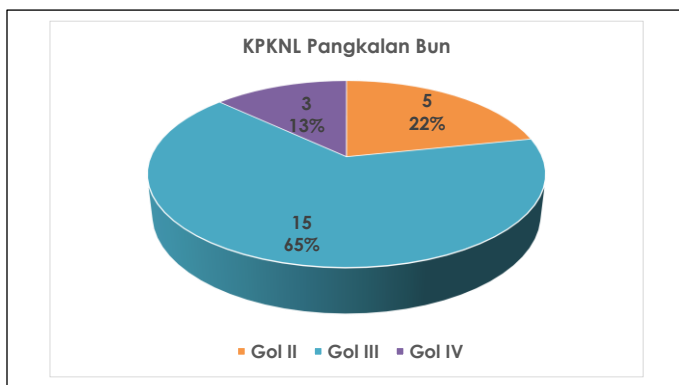
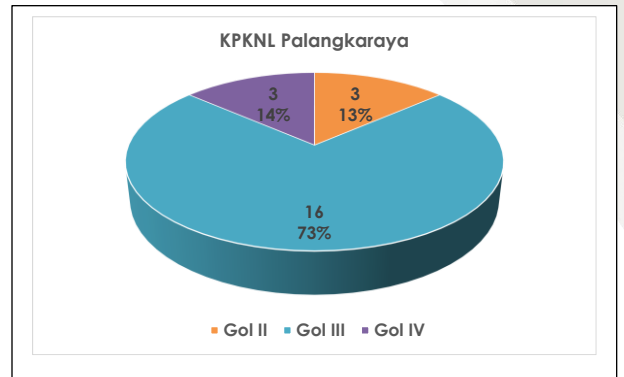
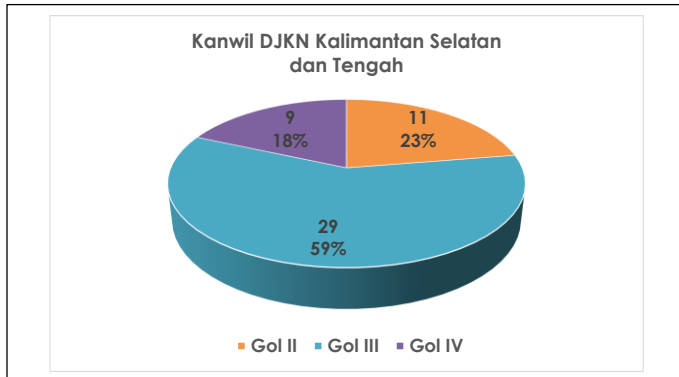
Keterangan:

Tahun Anggaran 2025 (sampai dengan Desember 2025) terdapat kekosongan jabatan pada Kepala Bidang Penilaian, sehingga Plt. Kabid Penilaian diemban oleh Kepala Seksi Penilaian I.

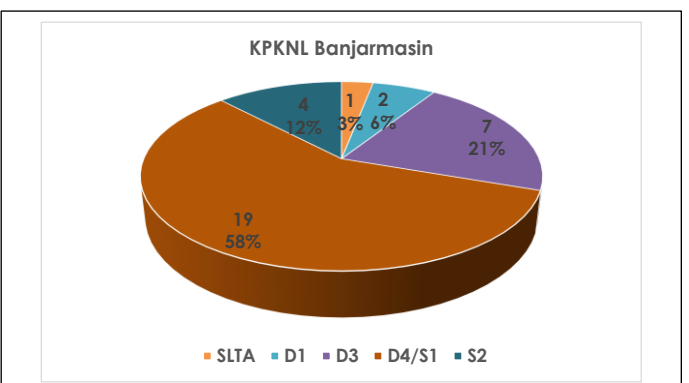
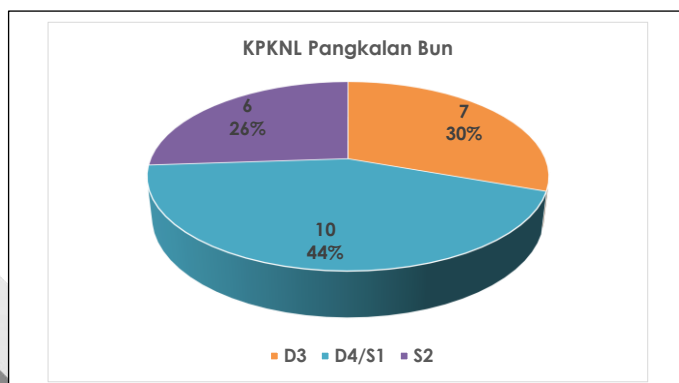
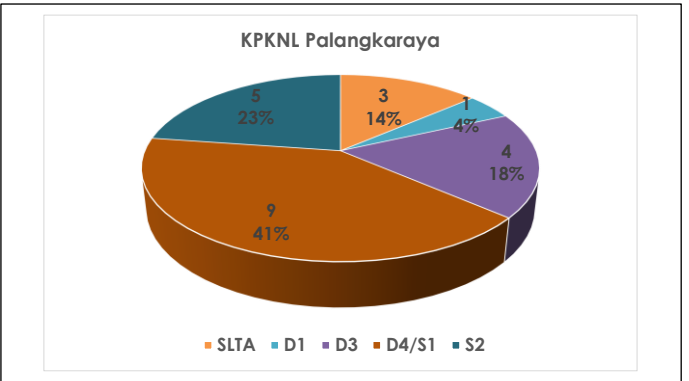
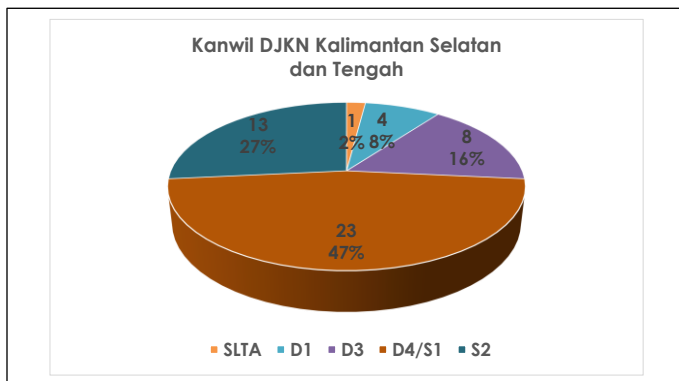


## 1) Matriks Pegawai

### 1. Golongan Kepangkatan

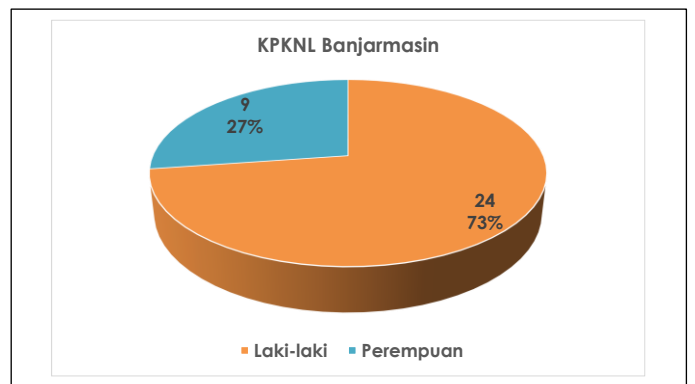
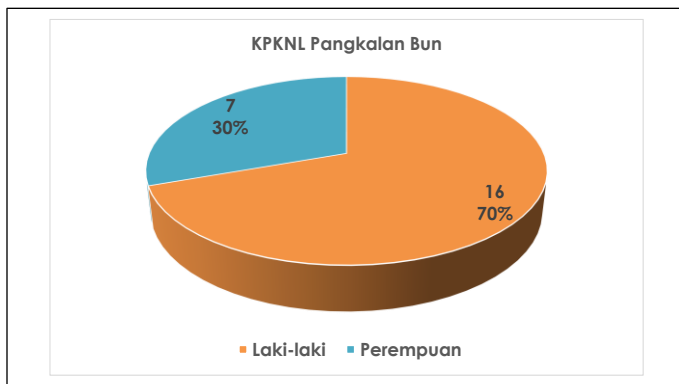
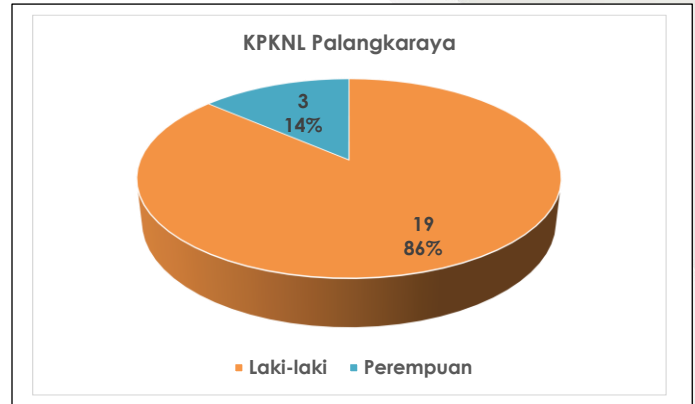
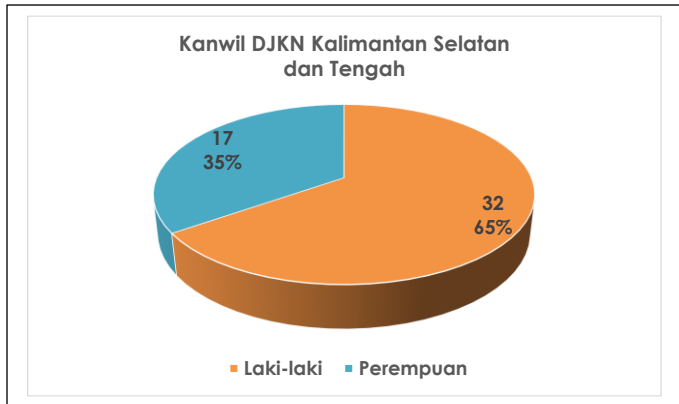


### 2. Pendidikan

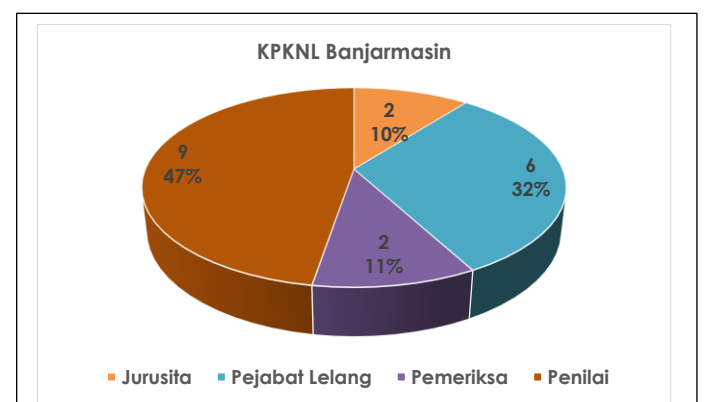
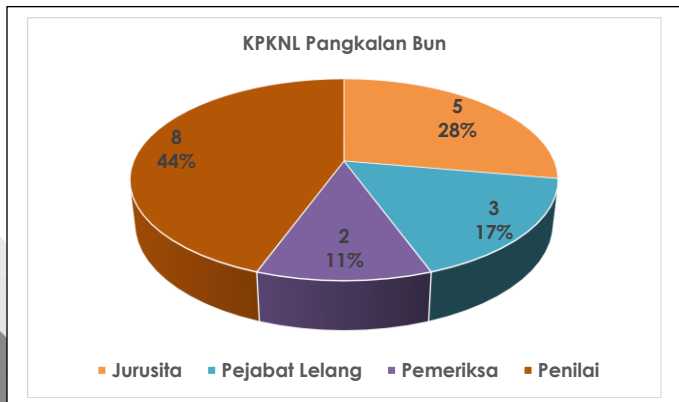
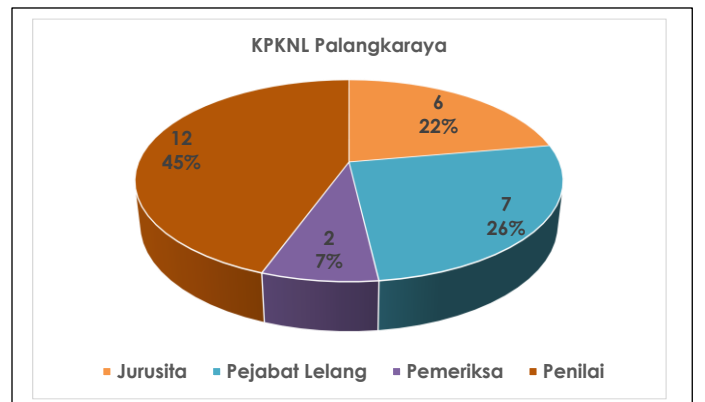
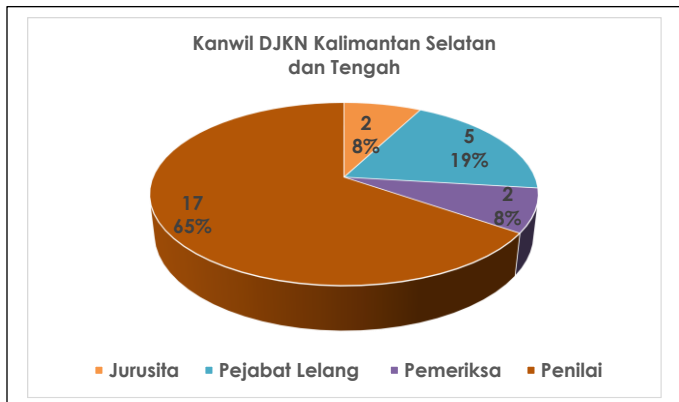




### 3. Jenis Kelamin

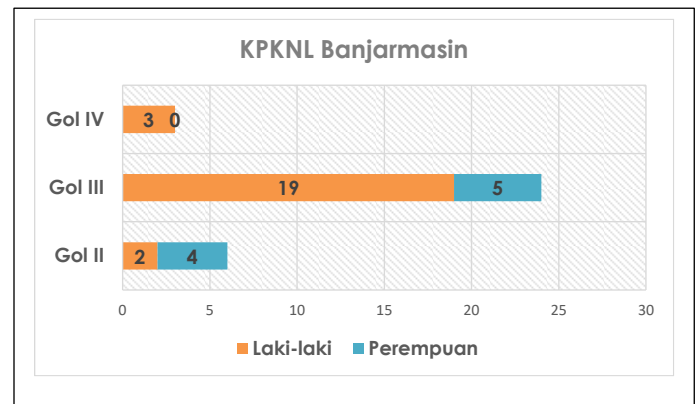
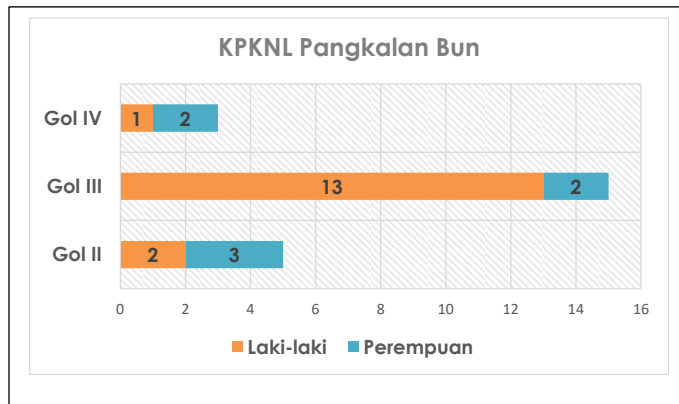
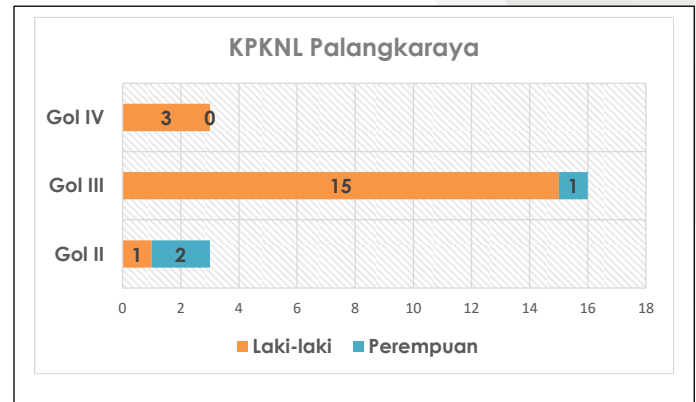
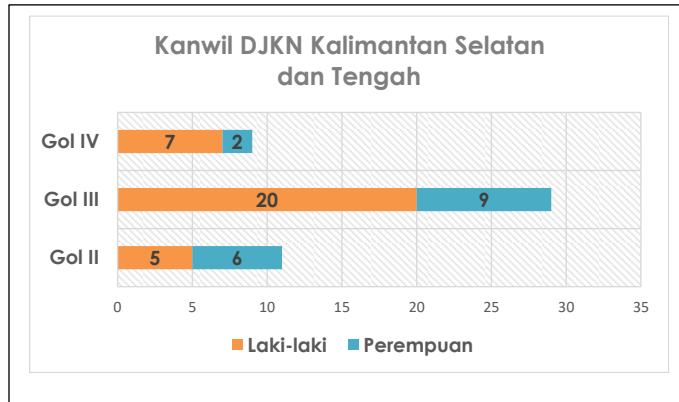


### 4. Jabatan Fungsional Teknis





5. Perbandingan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin



**2) Wilayah Kerja**

Kanwil DJKN Kalimantan Tengah dan Selatan membawahi tiga kantor layanan:

1. KPKNL Palangkaraya dengan wilayah kerja meliputi 9 Kabupaten/Kota;
2. KPKNL Pangkalan Bun dengan wilayah kerja meliputi 5 Kabupaten/Kota;
3. KPKNL Banjarmasin dengan wilayah kerja seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13 Kabupaten/Kota.

Untuk penjelasan lebih lanjut terkait letak geografis dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah beserta KPKNL di wilayah kerjanya dapat digambarkan sebagaimana peta dibawah ini.





Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat. <sup>a</sup>

A stylized graphic of a foot, colored in shades of blue and green, positioned diagonally across the page. The background is divided into three horizontal bands: light grey at the top, yellow in the middle, and orange at the bottom.

# 02.

## **Rencana Kinerja**

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026



## BAB II RENCANA KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Rencana strategis menjadi bahan acuan dalam proses manajemen kinerja secara keseluruhan yang meliputi:

1. Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*);
3. Penyusunan penetapan kinerja (*performance agreement*);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan; dan
5. Penyusunan laporan kinerja.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Renstra DJKN) telah ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Didalamnya telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Dalam Renstra tersebut dinyatakan bahwa **visi DJKN** yakni "**Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan**". Adapun misi DJKN yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
  2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
  3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
  4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu
- Dengan misi tersebut DJKN telah merumuskan tujuannya sebagaimana penjelasan berikut ini:
1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
  2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
  3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;



4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Adapun indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1:** Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1.1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Pengelolaan Aset (CP)	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40
2	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100
3	Persentase akurasi data IGT BMN	100	100	100	100	100
4	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	100	100	-	-
5	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100	100	100	100	100
6	Indeks Penyediaan BMN sebagai DNA Underlying SBSN	-	-	72	77	82

- 1.2. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang akuntabel

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase integrasi basis data Kekayaan Negara Lain-lain	-	100	100	100	100

- 1.3. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks efektivitas kebijakan investasi (CP)	100	100	100	100	100
2	Indeks efektivitas kinerja SMV (CP)	100	100	100	100	100

- 1.4. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara



No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	100	100	100	100
2	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	100	100	100
3	Persentase sinkronisasi data Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga	-	100	100	100	100

1.5. Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks efektivitas Asset Manager Forum	-	-	-	75	80

**Sasaran Strategis 2:** Layanan penilaian dan advisi yang profesional dan relevan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

2.1. Penguatan peran strategis layanan penilaian dan advisi untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	74	78	82	86
2	Indeks Ketergunaan Hasil Penilaian Sumber Daya Alam	70	74	78	82	86

**Sasaran Strategis 3:** Layanan lelang yang modern dan terpercaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

3.1. Layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100
2	Persentase produktivitas lelang	80	82	84	86	88

**Sasaran Strategis 4:** Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

4.1. Organisasi dan SDM yang optimal



No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (CP)	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
2	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara (CP)	100	100	100	100	100
3	Nilai evaluasi organisasi (CP)	100	100	100	100	100

4.2. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan (CP)	100	100	100	100	100

4.3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Integritas (CP)	100	100	100	100	100
2	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi (CP)	92,5	93	93,5	94	94,5

Adapun target kinerja DJKN Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target						
		2025	2026	2027	2028	2029		
1.	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.</b>							
	Indeks Pengelolaan Aset.*		3,00 (Skala 4)	3,10 (Skala 4)	3,20 (Skala 4)	3,30 (Skala 4)	3,40 (Skala 4)	
	a.	<b>Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.</b>						
		1)	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.	100%	100%	100%	100%	100%
		2)	Persentase akurasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) BMN.	100%	100%	100%	100%	100%
		3)	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.	100%	100%	100%	-	-
		4)	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan.	100%	100%	100%	100%	100%
		5)	Indeks Penyediaan BMN sebagai DNA Underlying SBSN.	-	-	72	77	82
		6)	Persentase integrasi basis data Kekayaan Negara Lain-lain.	-	100%	100%	100%	100%
		7)	Indeks efektivitas kebijakan investasi.*	100	100	100	100	100
		8)	Indeks efektivitas kinerja SMV.*	100	100	100	100	100
		9)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara.	100%	100%	100%	100%	100%
		10)	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara.	100%	100%	100%	100%	100%
11)		Persentase sinkronisasi data piutang negara pada Kementerian/Lembaga.	-	-	-	100%	100%	
12)	Indeks efektivitas Asset Manager Forum.	-	-	-	75	80		
2.	<b>Layanan penilaian dan advisi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.</b>							
	Tingkat kualitas layanan penilaian.		70%	74%	78%	82%	86%	

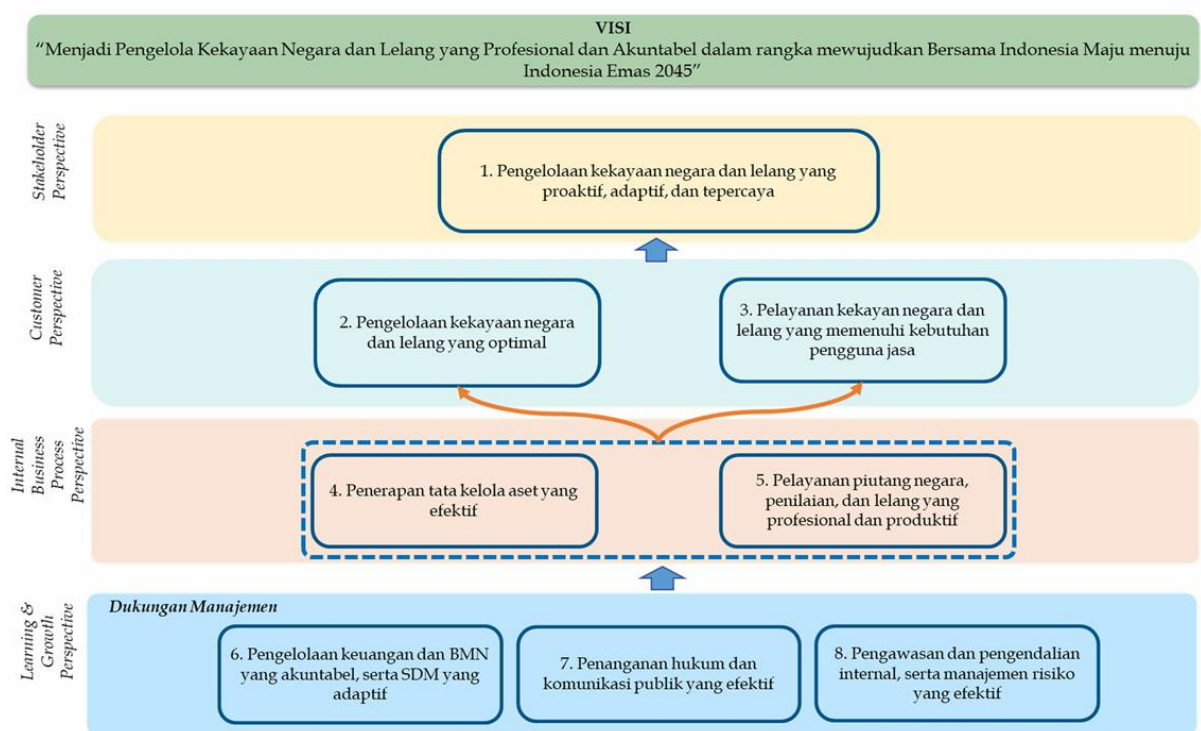


No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
a.	<b>Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.</b>						
	1)	Indeks ketergunaan hasil penilaian sumber daya alam.	70%	74%	78%	82%	86%
3.	<b>Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.</b>						
	Persentase realisasi pokok lelang.		100%	100%	100%	100%	100%
a.	<b>Layanan lelang yang modern dan terpercaya.</b>						
	1)	Persentase produktivitas lelang.	80%	82%	84%	86%	88%
4.	<b>Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.</b>						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.*		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)
a.	<b>Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.</b>						
	1)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara.*	100%	100%	100%	100%	100%
	2)	Nilai evaluasi organisasi.*	100	100	100	100	100
	3)	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan.*	100%	100%	100%	100%	100%
	4)	Indeks Integritas.*	100	100	100	100	100
	5)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi.*	92,5	93	93,5	94	94,5

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berikut ini adalah Peta Strategi DJKN 2025 yang telah ditetapkan pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, yaitu:



Sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebagaimana yang tersusun dalam daftar berikut ini:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp56,5 M)
		1b-CP	Indeks integritas	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,835 M)
		2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100
		2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp981,9 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%



5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase produktivitas lelang	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%

Target diatas sudah termasuk *addendum* yang dilaksanakan pada Triwulan IV 2025 terhadap IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Macet, karena terdapat perubahan target dan/atau trajektori target baru pada UPK di lingkungan DJKN (KPKNL Palangkaraya).

### **C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026**

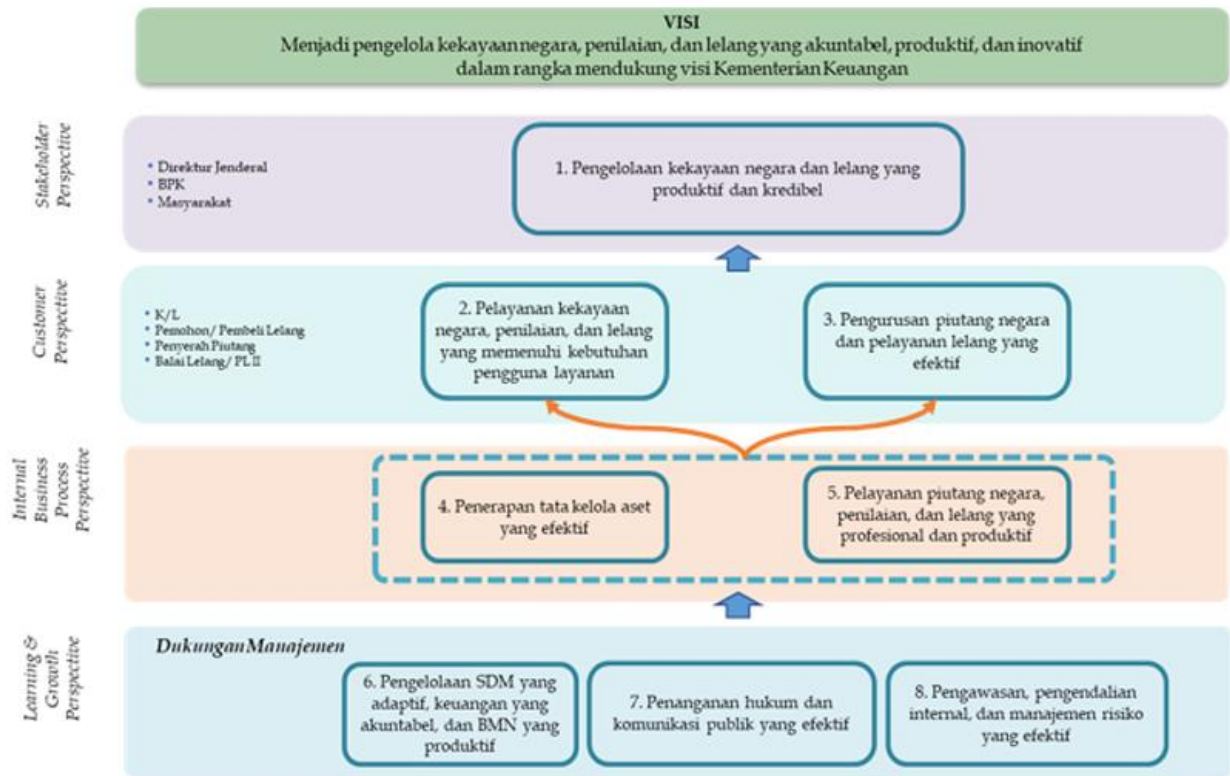
Untuk hal Penyusunan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Piagam Manajemen Risiko Pimpinan Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2026, Kantor Pusat DJKN telah melakukan beberapa kegiatan pendukung sebagai persiapan meliputi:

1. Rapat Pleno IKI/IKU Mandatory Tahun 2026 sesuai Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor UND-41/KN.1/2026 tanggal 22 Januari 2026. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring melalui media *Microsoft Teams* pada tanggal 23 Januari 2026;
2. Sosialisasi penyusunan Perjanjian Kinerja UPK-Two dan UPK-Three pada aplikasi Satu Kemenkeu sebagaimana disampaikan dalam nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-293/KN.1/2026 tanggal 27 Januari 2026 hal Penyusunan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Piagam Manajemen Risiko Pimpinan Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui media *Microsoft Teams* pada tanggal 28 Januari 2026;

Berikut ini adalah Peta Strategi DJKN 2026 beserta IKU pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, yaitu:




**Peta Strategi**



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 47,6 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 1,9 M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 949 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%



5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi 2025
- B. Realisasi Anggaran
- C. Analisa atas Efisiensi Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-lain



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

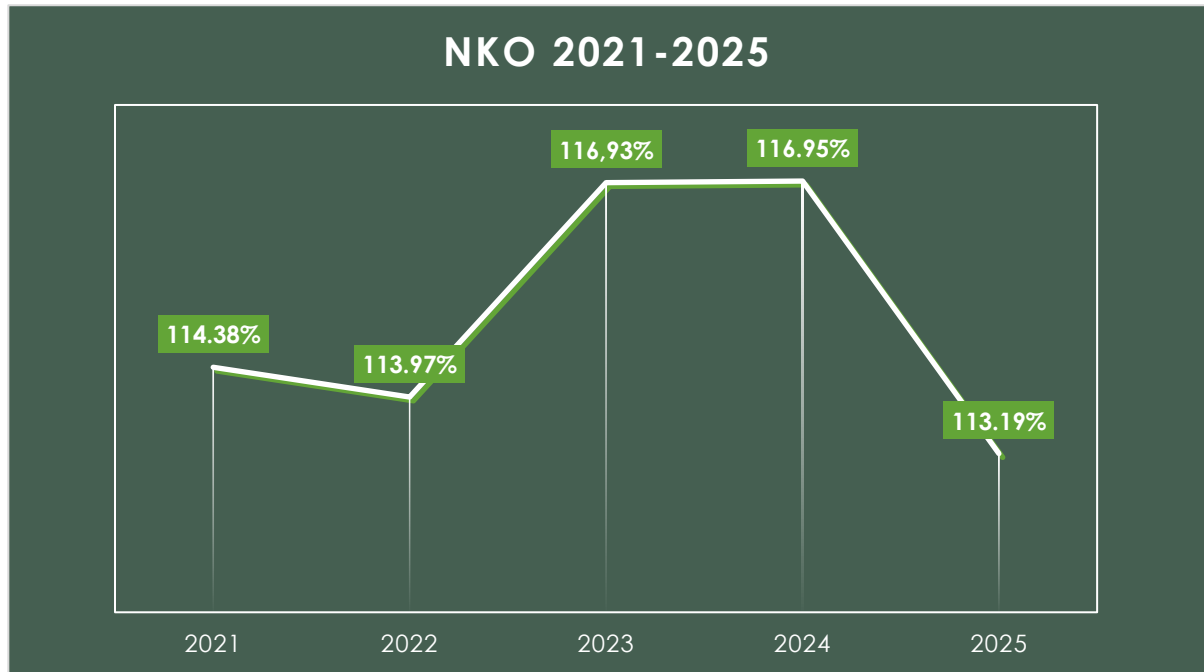
### A. Capaian Kinerja Organisasi 2025

Pada tahun 2025 ini Nilai Kinerja Organisasi pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebesar **113,19%**. Adapun pencapaian secara keseluruhan atas masing-masing IKU tergambar pada tabel berikut ini:

Kode	IKU	Polarisasi	VIC	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective	
				s. d. Triwulan IV	s. d. Triwulan IV							
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>											104.26	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-										104.26
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100	105.29	19.00%	57.58%	105.29	105.29	60.62		
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100.00%	102.86%	14.00%	42.42%	102.86	102.86	43.64		
<b>Customer Perspective (20%)</b>											116.12	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-										116.12
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100.00%	114.95%	19.00%	36.54%	114.95	114.95	42		
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	103.82%	19.00%	36.54%	103.82	103.82	37.93		
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	127.29%	14.00%	26.92%	127.29	120	32.31		
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-										120
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77	97.63	14.00%	33.33%	126.79	120	40		
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74	100.85	14.00%	33.33%	136.28	120	40		
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	Max	P/M	70	96	14.00%	33.33%	137.14	120	40		
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>											118.21	
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-										118.21
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100.00%	112.84%	14.00%	50.00%	112.84	112.84	56.42		
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	50.00%	120	120	60		
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-										120
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	358.06%	14.00%	33.33%	358.06	120	40		
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	119.09%	14.00%	33.33%	170.13	120	40		
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80.00%	120.00%	14.00%	33.33%	150	120	40		
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>											116.53	
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-										116.53
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100	120	14.00%	33.33%	120	120	40		
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100	120	14.00%	33.33%	120	120	40		
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80.00%	100.00%	14.00%	33.33%	125	120	40		
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-										117.13
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Max	P/M	3.55	6.09	14.00%	50.00%	171.45	120	60		
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100	114.26	14.00%	50.00%	114.26	114.26	57.13		
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-										112.47
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80	98.81	14.00%	50.00%	123.52	120	60		
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Max	P/M	95.30%	100.00%	14.00%	50.00%	104.93	104.93	52.47		
<b>NKO</b>											<b>113.19</b>	



Upaya maksimal selalu dilakukan oleh seluruh jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah untuk memperoleh hasil terbaik atas pemenuhan target yang sudah ditetapkan. Adapun tren Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dalam kurun 5 tahun terakhir (2021-2025) pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tergambar dari grafik berikut ini.



Untuk capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

### 1. Indeks Integritas

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya						
	1a-CP Indeks integritas						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	120	120	105,29	105,29	
Capaian	100	100	120	120	105,29	105,29	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.



#### IKU Indeks Integritas

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	92	-	105,29%
2024	89.17		92		-	92.44 (103.67%)
2023	88.67	91.5	91.5	91	-	89.17(100.56%)
2022		91	91	91	-	
2021		90.5	90.5	90.5	-	

Terjadi proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

#### Isu Utama:

IKU Indeks Integritas sesuai perubahan Manual IKU dihitung berdasarkan tindak lanjut rencana aksi dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024, di mana perhitungan tindak lanjut rencana aksi secara triwulanan dilakukan dengan formula Akumulasi realisasi kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut dibandingkan akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut. Capaian maksimal untuk triwulan I s.d. III adalah 120% dan 100% untuk triwulan IV.

#### Implikasi:

Sesuai Nota Dinas Seditjen nomor ND-926/KN.1/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Penyampaian Hasil SPI Tahun 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI, terdapat total 14 rencana aksi yang perlu direalisasikan oleh seluruh unit DJKN selama tahun 2025, di mana 3 di antaranya ditargetkan untuk diselesaikan pada triwulan III 2025, yaitu:

1. Melakukan pemantauan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi
2. Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan
3. Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan



**Akar masalah:**

Untuk menjaga dan menguatkan integritas para pegawai di unit kerja dilakukan upaya berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan peraturan yang berlaku. Untuk menjaga integritas, perlu dibangun kesadaran moral yang kuat, pendidikan karakter sejak dini, keteladanan dari pemimpin, serta sistem yang transparan dan tegas dalam menindak pelanggaran.

**Tindakan yang Telah Dilaksanakan**

Kanwil DJKN Kalselteng telah melaksanakan rencana aksi sesuai ND Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara No ND 926/KN.1/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) DJKN Tahun 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI untuk periode Triwulan III Tahun 2025.

**Rekomendasi Rencana Aksi:**

1. Diseminasi kebijakan dan pengelolaan SDM terkait promosi/pola mutasi di lingkungan DJKN
2. Pembinaan/workshop/sharing session untuk meningkatkan kapasitas entitas Pengadaan Barang/Jas
3. Mewajibkan para pejabat dan pelaksana untuk mengikuti pelatihan penguatan integritas dan pencegahan korupsi
4. Penerbitan naskah dinas pimpinan unit kerja yang memuat imbauan pengendalian gratifikasi dan penegasan agar tidak menjamu pimpinan secara berlebihan

**2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	56.52 M		100%		-	58.14M (102.86%)
2024	43.35 M	100%	100%	100%	-	101.48M (120%)
2023	33.86M	100%	100%	100%	-	54.25M(120%)
2022	22.88M	100%	100%	100%	-	65.36M(120%)
2021	22,36M	100%	100%	100%	-	35.07M(156.82%)



Terjadi proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

IKU ini terdiri atas 3 penerimaan negara yang dijelaskan lebih terperinci sebagaimana penjelasan dibawah ini:

**a. PNPB Aset**

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya						
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP Aset)						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5.398.573.403	15.565.693.615,60	15.565.693.615,60	24.838.252.125,35	33.305.000.000	33.305.000.000	Max/TLK
Realisasi	4.575.129.625	13.559.917.748,00	13.559.917.748,00	28.428.438,862	40,983,857,560	40,983,857,560	
Capaian	84,75	87,11	87,11	114,45%	123,05%	123,05%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

**Isu Utama:**

1. Satuan Kerja belum optimal dalam pemanfaatan BMN.
2. Minat pelaku usaha untuk memanfaatkan BMN dalam usaha bisnisnya belum optimal.

**Implikasi:**

Tidak maksimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pengelolaan Barang Milik Negara

**Akar Masalah:**

1. KPKNL di unit Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berada di wilayah kabupaten dimana Satuan Kerjanya relatif tidak memiliki BMN yang potensial untuk dapat dilakukan pemanfaatan.
2. Kurangnya kesadaran Satuan Kerja dan juga minat dari pelaku usaha dalam pemanfaatan BMN berdampak penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan BMN belum sepenuhnya optimal, Sementara jika BMN dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, dapat membantu mengembangkan perekonomian bagi pelaku usaha maupun negara



**Tindakan yang dilaksanakan:**

1. Melakukan monitoring dan optimalisasi aset negara pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan
2. Mengadakan kegiatan Bincang Aset pada 20 Januari 2025 (UND-16/WKN.12/2025), 20 Februari 2025 (UND-29/WKN.12/2025), dan 20 Maret 2025 (UND-50/WKN.12/2025)
3. Mengadakan kegiatan Laboratorium Aset pada 25 Februari 2025(UND-34/WKN.12/2025), 11 Juni 2025 (UND-119/WKN.12/2025), 16 September 2025 (UND-203/WKN.12/2025)
4. Menyampaikan surat kepada korwil untuk segera menindaklanjuti BMN yang rusak berat untuk dilakukan penjualan atau penghapusan

**Rekomendasi dan Rencana Aksi:**

1. Mencari sumber potensial untuk pemasukan PNPB;
2. Mendorong satuan kerja untuk melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang rusak berat;
3. Peningkatan pemahaman pengelolaan BMN kepada KPKNL dan satuan kerja;
4. Penggalan Potensi Pengelolaan BMN.

**b. PNPB Piutang Negara**

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya						
	1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNPB Piutang Negara)						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	11.100.000	33.200.000	33.200.000	54.150.000	76.100.000	76.100.000	Max/TLK
Realisasi	20.905.731	43.592.193	43.592.193	68.762.539	91.073.487,40	91.073.487,40	
Capaian	188,34	131,30	131,30	126,98%	<b>119,67%</b>	<b>119,67%</b>	

Capaian dimaksud didominasi dari pembayaran angsuran debitor pada KPKNL Palangka Raya dalam bentuk mata uang Dollar Amerika, pembayaran angsuran debitor dari Penyerah Piutang yang berasal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada KPKNL Banjarmasin, dan pembayaran angsuran debitor dari Penyerah Piutang yang berasal dari Pemerintah Daerah pada KPKNL Pangkalan Bun.

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

**Isu Utama:**

1. Sebagian besar Piutang Negara, yaitu sebanyak 172 berkas kasus piutang negara (BKPN) atau sekitar 93,5%, memiliki nilai pokok di bawah Rp1 miliar. Kondisi ini



- menyebabkan potensi penurunan nilai secara agregat menjadi kurang signifikan terhadap total outstanding piutang. Selain itu, profil penanggung hutang didominasi oleh kelompok usaha rakyat, khususnya Karya Tani dan nelayan, yang umumnya memiliki kapasitas pembayaran terbatas.
2. Terjadinya selisih nilai kurs tengah rupiah terhadap dolar AS dalam penghitungan angsuran piutang, khususnya di wilayah kerja Kalimantan Tengah, mengakibatkan terjadinya deviasi antara data capaian yang dilaporkan dan realisasi nominal yang seharusnya diterima.

**Implikasi:**

1. Disparitas data capaian antara unit pengelola piutang dan unit pemantau kinerja disebabkan oleh perbedaan acuan nilai kurs yang digunakan dalam proses konversi valuta asing, khususnya terhadap pembayaran dalam denominasi dolar Amerika Serikat.
2. Realisasi penerimaan negara BIAD PN terdampak secara langsung oleh tingkat kepatuhan debitur, terutama disebabkan oleh ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban angsuran piutang negara.

**Akar Masalah:**

1. penurunan aktivitas ekonomi pada debitur yang menyebabkan banyaknya debitur yang kesulitan untuk membayar angsurannya
2. Banyaknya debitur yang tidak mampu dan tidak ditemukan keberadaannya.

**Tindakan yang dilaksanakan:**

1. Mendorong agar KPKNL memastikan berkas kasus piutang negara (BKPN) diteliti sebelum diterima;
2. Mendorong agar KPKNL melaksanakan Pemeriksaan Piutang Negara guna menyelesaikan BKPN lama;
3. Mendorong agar KPKNL terus melaksanakan penggalan potensi untuk meningkatkan setoran pelunasan piutang negara.

**Rekomendasi dan Rencana Aksi:**

1. Mendorong agar KPKNL memastikan berkas kasus piutang negara (BKPN) diteliti sebelum diterima;
2. Mendorong agar KPKNL melaksanakan Pemeriksaan Piutang Negara guna menyelesaikan BKPN lama;



3. Mendorong agar KPKNL terus melaksanakan penggalan potensi untuk meningkatkan setoran pelunasan piutang negara.
4. Agar KPKNL dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bentuk optimalisasi kewenangan PUPN dalam melaksanakan pemeriksaan debitur;
5. Bersama KPKNL melakukan penggalan potensi Piutang Daerah (Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten) setempat dan/atau Piutang K/L melalui kegiatan sosialisasi/bimtek/koordinasi langsung dengan instansi target guna memperoleh penyerahan BKPN baru;
6. Bersama KPKNL melakukan penggalan potensi penyerahan BKPN dari lembaga sui generis BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga sui generis lainnya.

**c. PNBP Lelang**

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya						Pol/KP
	1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Piutang Negara)						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	
Target	11.100.000	33.200.000	33.200.000	54.150.000	76.100.000	76.100.000	Max/TLK
Realisasi	20.905.731	43.592.193	43.592.193	68.762.539	91.073.487,40	91.073.487,40	
Capaian	188,34	131,30	131,30	126,98%	119,67%	119,67%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

**Isu Utama:**

Secara umum volume usulan lelang eksekusi hak tanggungan di Tahun 2025 sebenarnya cukup besar. Tahun 2025 menyajikan komposisi yang sedikit berbeda dari Tahun 2024, dimana porsi kontribusi pokok lelang lebih dominan diberikan oleh lelang sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Sementara di Tahun 2024, lelang eksekusi hak tanggungan berkontribusi cukup besar dalam pokok lelang karena adanya *booming* lelang dengan nominal fantastis. Perbedaan utamanya adalah pada tarif PNBP dari lelang sukarela barang bergerak oleh Pejabat Lelang Kelas II yang mana sesuai ketentuan sebesar 0,6% dari pokok lelang, sedangkan untuk lelang eksekusi hak tanggungan barang tidak bergerak oleh Pejabat Lelang Kelas I adalah sebesar 4% dari pokok lelang (penjumlahan dari total 2% bea lelang penjual dan 2% bea lelang pembeli). Penurunan kontribusi lelang eksekusi hak tanggungan ini secara linear berkontribusi pada penurunan PNBP lelang di Tahun 2025.

**Implikasi:**

1. Menurunnya daya beli masyarakat akibat kondisi perekonomian yang belum stabil mengakibatkan sedikitnya objek Lelang Hak Tanggungan yang memiliki pembeli potensial;



2. Beberapa lelang HT yang dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi;
3. Belum adanya objek lelang yang dimohonkan/laku dengan nominal limit lelang yang sangat besar atau sering disebut booming Lelang;
4. Menurunnya intensitas usulan lelang barang rampasan.

**Akar Masalah:**

1. Kondisi perekonomian yang belum stabil mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat;
2. PMK Nomor 199/2022 yang memberikan relaksasi atas dokumen usulan Lelang barang rampasan telah berakhir masa berlakunya.
3. Yang menjadi masalah adalah tingkat keterlaksanaan lelang yang di bawah ekspektasi.

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Pembinaan ke KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin;
2. Pelaksanaan monev secara berkala pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025;
3. Penggalian potensi ke *stakeholders* (perbankan, satker Pengadilan Tinggi Agama dan Kejaksaan Tinggi wilayah Kalimantan Selatan);
4. Sosialisasi terkait ketentuan terkait lelang dengan mengundang narasumber dari Direktorat Hukum dan Humas serta Kanwil ATR/BPN Provinsi Kansel.

**Rekomendasi Rencana Aksi:**

1. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalian potensi lelang kepada *stakeholders*;
2. Melakukan pembinaan lanjutan ke KPKNL cq. PL Kelas I dan ke PL Kelas II;
3. Melanjutkan kegiatan monev secara berkala.
4. Tahun 2026 Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah akan berupaya lebih intensif melakukan koordinasi dengan perbankan dan lebih masif melakukan pemasaran lelang sehingga informasi terkait mekanisme lebih banyak menjangkau masyarakat umum.
5. Optimalisasi jenis lelang lainnya seperti lelang aset desa, BMD, dan BMN akan diupayakan agar dapat lebih berkontribusi maksimal terhadap pencapaian target PNBPN Lelang.



### 3. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	133.637.678.800	356.678.081.000	356.678.081.000	736.921.954.000	981.908.000.000	981.908.000.000	Max/TLK
Realisasi	248.872.755.840	488.096.983.201	488.096.983.201	734.488.362.275	1.019.395.843.224	1.019.395.843.224	
Capaian	186,23	136,85	136,85	99,67	<b>103,82%</b>	<b>103,82%</b>	

Pada Tahun 2025, lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang dan Pejabat lelang Kelas II memberikan peningkatan pokok lelang yang signifikan dibandingkan dengan kontribusi pokok lelang yang dihasilkan oleh KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas I. Peningkatan kinerja pokok lelang dari Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II ini bahkan melampaui penurunan kontribusi pokok lelang dari KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas I, sehingga di akhir periode Tahun 2025, secara akumulatif kinerja pokok lelang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024.

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

#### Persentase Realisasi Pokok Lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2025</b>	981,90M	-	100%			1.019,39 M(103,82%)
<b>2024</b>	747,45M	-	100%			966,53M(120%)
<b>2023</b>	377,5M	-	100%	100%		458,43M(121,44%)
<b>2022</b>	354M	-	100%	100%		377,36M(106,60%)
<b>2021</b>	350M	-	100%	100%		369,02M(105,43%)

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

#### Isu Utama:

1. Menurunnya daya beli masyarakat akibat kondisi perekonomian yang belum stabil mengakibatkan sedikitnya objek Lelang Hak Tanggungan yang memiliki pembeli potensial;
2. Beberapa lelang HT yang dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi;



3. Belum adanya objek lelang yang dimohonkan/laku dengan nominal limit lelang yang sangat besar atau sering disebut booming lelang;
4. Menurunnya intensitas usulan lelang barang rampasan.

**Implikasi:**

1. Menurunnya daya beli masyarakat akibat kondisi perekonomian yang belum stabil mengakibatkan sedikitnya objek Lelang Hak Tanggungan yang memiliki pembeli potensial;
2. Beberapa lelang HT yang dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi;
3. Belum adanya objek lelang yang dimohonkan/laku dengan nominal limit lelang yang sangat besar atau sering disebut booming Lelang;
4. Menurunnya intensitas usulan lelang barang rampasan.

**Akar Masalah:**

1. Kondisi perekonomian yang belum stabil mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat;
2. PMK Nomor 199/2022 yang memberikan relaksasi atas dokumen usulan Lelang barang rampasan telah berakhir masa berlakunya.
3. Yang menjadi masalah adalah tingkat keterlaksanaan lelang yang di bawah ekspektasi.

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Pembinaan ke KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin;
2. Pelaksanaan monev secara berkala pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025;
3. Penggalan potensi ke *stakeholders* (perbankan, satker Pengadilan Tinggi Agama dan Kejaksaan Tinggi wilayah Kalimantan Selatan);
4. Sosialisasi terkait mekanisme lelang Barang Milik Desa di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk meningkatkan potensi capaian dari jenis Lelang yang relative baru;
5. Mengusulkan ke Kanpus untuk membuka akses pengajuan Lelang 1.Barang Milik Desa melalui *lelang.go.id*.

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalan potensi lelang ke *stakeholders*;
2. Melakukan pembinaan lanjutan ke KPKNL cq. PL Kelas I dan ke PL Kelas II;
3. Melanjutkan kegiatan monev secara berkala;
4. Penggalan potensi kepada Balai Lelang.



- Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah akan terus mendukung Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II untuk dapat mempertahankan kinerja dengan melakukan supervisi dan monitoring secara berkala, sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan dapat optimal dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### 4. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	2b-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	113,67%	130,37%	130,33%	107,03%	114,95%	114,95%	
Capaian	227,34	217,22	217,22	133,79	<b>114,95</b>	<b>114,95</b>	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2025</b>	100%		100%	70%	-	114,95%
<b>2024</b>	71.65%	70%	70%	70%	-	101.48M (120%)
<b>2023</b>	68%	65%	65%	65%	-	82.19%(120.87%)
<b>2022</b>	65%	60%	60%	60%	-	78.60%(120%)
<b>2021</b>	62%	57%	57%	57%	-	78.95%(127.34%)

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.



**Isu Utama:**

1. IKU Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan IKU baru di tahun 2025, sebagai tindak lanjut penghitungan SBSK, masih diperlukan peningkatan pemahaman bagi Kanwil, KPKNL dan Satuan Kerja terkait IKU Optimalisasi.
2. Optimalisasi terhadap BMN yang memiliki SBSK kurang dari 50%

**Implikasi:**

Kanwil dan KPKNL perlu meningkatkan pemahaman penghitungan IKU Optimalisasi berikut strategi pencapaian target.

**Akar Masalah:**

Satuan kerja belum memahami dan melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMN secara optimal

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Melakukan monitoring dan optimalisasi aset negara pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan
2. Melaksanakan kegiatan penguatan optimalisasi aset negara bersama Direktorat PKN dan KPKNL di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah sesuai undangan nomor: Und-61/WKN.12/2025 tanggal 19 Maret 2025
3. Melakukan validasi atas laporan optimalisasi aset negara pada KPKNL
4. Menyampaikan nota dinas nomor: ND-533/WKN.12/2025 tanggal 6 Mei 2025 hal Percepatan Tingkat Optimalisasi Aset Negara
5. Melakukan pembinaan optimalisasi kepada KPKNL (ST-242/WKN.12/2025)
6. Mengakomodir perubahan target optimalisasi aset negara dengan aset yang lebih potensial untuk dilakukan optimalisasi

**Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi secara berkala
2. Secara rutin mengadakan kegiatan Bincang Aset dan Laboratorium Aset sebagai wadah sosialisasi terkait pengelolaan BMN
3. Bimtek Penatausahaan dan Pengelolaan BMN
4. Menghadirkan narasumber yang memadai dalam kegiatan bimtek
5. Forum bedah kasus penatausahaan dan pengelolaan BMN



**5. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara**

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	528.450.000	1.585.350.000	1.585.350.000	2.643.950.000	3.835.205.000	3.835.205.000	Max/TLK
Realisasi	788.465.566	2.304.010.068	2.304.010.068	3.835.204.449	4.881.922.393	4.881.922.393	
Capaian	149,20	145,33%	145,33%	145,06%	<b>127,29%</b>	<b>127,29%</b>	

Capaian dimaksud didominasi dari pengurusan Piutang Negara pada tahap Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) pada KPKNL Palangka Raya (79% PSBDT), KPKNL Pangkalan Bun (71% PSBDT), dan KPKNL Banjarmasin (70% PSBDT). Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2025</b>	3,83M	-	100%	-	-	4,88(127,29%)
<b>2024</b>	12,59M	-	-	-	-	15,706M(120%)
<b>2023</b>	12,59M	-	-	100%	-	14,43M(114,59%)
<b>2022</b>	9,48M	-	-	-	-	9,78M(103,11%)
<b>2021</b>	17,96M	-	-	-	-	49,703M(276,74%)

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Isu Utama:**

1. Sebagian besar Piutang Negara, yaitu sebanyak 175 berkas kasus piutang negara (BKPN) atau sekitar 93%, memiliki nilai pokok di bawah Rp1 miliar. Kondisi ini menyebabkan potensi penurunan nilai secara agregat menjadi kurang signifikan terhadap total outstanding piutang. Selain itu, profil penanggung hutang didominasi oleh kelompok usaha rakyat, khususnya Karya Tani dan nelayan, yang umumnya memiliki kapasitas pembayaran terbatas.



2. Terjadinya selisih nilai kurs tengah rupiah terhadap dolar AS dalam penghitungan angsuran piutang, khususnya di wilayah kerja Kalimantan Tengah, mengakibatkan terjadinya deviasi antara data capaian yang dilaporkan dan realisasi nominal yang seharusnya diterima.

**Implikasi:**

1. Disparitas data capaian antara unit pengelola piutang dan unit pemantau kinerja disebabkan oleh perbedaan acuan nilai kurs yang digunakan dalam proses konversi valuta asing, khususnya terhadap pembayaran dalam denominasi dolar Amerika Serikat.
2. Realisasi penerimaan negara BIAD PN terdampak secara langsung oleh tingkat kepatuhan debitur, terutama disebabkan oleh ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban angsuran piutang negara.

**Akar Masalah:**

1. Masih terdapat BKPN yang dapat dioptimalkan penyelesaiannya.
2. Terdapat banyak debitur yang tidak membayarkan angsuran piutang.

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Berkoordinasi dengan KPKNL dan penyerah piutang terkait pengurusan PN.
2. Mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada KPKNL
3. Merencanakan bantuan anggaran untuk penyelesaian piutang negara.
4. Mendorong KPKNL Untuk mempercepat proses pengurusan piutang negara (panggilan, pernyataan Bersama, surat paksa, surat sita).

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Berkoordinasi dengan KPKNL dan penyerah piutang terkait pengurusan PN.
2. Mendorong KPKNL Untuk mempercepat proses pengurusan piutang negara ( panggilan, pernyataan Bersama, surat paksa, surat sita)
3. Guna mencapai target penyelesaian BKPN, KPKNL diharapkan dapat mengintensifkan pengurusan PN pada BKPN yang menjadi prioritas sehingga terjadi peningkatan tahapan pengurusan piutang negara, serta melakukan pemetaan progres pengurusan BKPN existing;
4. Meningkatkan kerjasama untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelesaian Piutang Daerah Macetnya dengan berkoordinasi dengan KPPN ataupun KPP/KPBC setempat.



**6. Indeks kepuasan pengguna layanan**

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	Max/Average
Realisasi	97,97	94	94	98,8	100	97,63	
Capaian	97,97	94,00	95,98	125,76	<b>129,87</b>	<b>126,79</b>	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dalam kurun waktu 5 tahun terkahir belum dapat dilakukan karena Indeks kepuasan pengguna layanan baru dimasukan sebagai IKU mulai tahun 2025. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

**Indeks Kepuasan Pengguna Layanan**

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	4,20	4,20	4,20	-	4,88(127,29%)
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Isu Utama:**

Sesuai Nota Dinas Seditjen Nomor ND-884/KN.1/2025 tanggal 24 Maret 2025 hal Pelaksanaan E-SKPL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan media digital (e-SKPL) untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan.



**Implikasi:**

Hasil survei kepuasan pengguna layanan digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkup Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

**Akar Masalah:**

Sesuai Nota Dinas Sesditjen Nomor ND-884/KN.1/2025 tanggal 24 Maret 2025 hal Pelaksanaan E-SKPL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan media digital (e-SKPL) untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan. Sehingga Kanwil DJKN Kalselteng perlu menjalin intimasi secara berkelanjutan dengan stakeholders untuk meningkatkan pemahaman atas pertanyaan yang muncul saat mengisi e-SKPL agar tidak menimbulkan salah persepsi dan mendorong Kanwil DJKN Kalselteng untuk terus meningkatkan pelayanan.

**Tindakan yang telah dilakukan:**

Menyebarkan informasi e-SKPL kepada seluruh pengguna layanan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

Menjalin intimasi dan menyebarkan informasi e-SKPL kepada pengguna layanan melalui KPKNL dan Bidang teknis.

**Rekomendasi rencana aksi:**

Menjalin intimasi dan menyebarkan informasi e-SKPL kepada pengguna layanan melalui Bidang teknis.

**7. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi**

Nama Unit	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
	3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	Max/Average
Realisasi	103,42	104,69	104,05	101,52	96,33	100,22	
Capaian	103,42%	140,61%	140,61%	137,19%	<b>130,17%</b>	<b>135,43%</b>	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.



Perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum dapat dilakukan karena Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi baru dimasukan sebagai IKU mulai tahun 2025. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Indeks Efektivitas edukasi dan komunikasi

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77				-	100,22(135,43%)
2024	-	-		-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

#### Isu Utama:

Bidang Penilaian : Para Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah DJKN dan/atau Instansi Pengguna tidak dapat mengikuti kegiatan Sosialisasi dari Kantor Pusat karena jadwal yang bersamaan dengan kegiatan survey lapangan.

Pada Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara : Lokasi satker yang tersebar di dua Provinsi (Kalsel dan Kalteng) dan keterbatasan anggaran perjadin yang dimiliki oleh satker berdampak edukasi dan komunikasi secara luring menjadi terbatas.

Pada Bidang Lelang : Mekanisme lelang belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh instansi/stakeholders yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkontribusi pada pelaksanaan lelang

Bidang Piutang Negara : Stakeholder dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah masih belum memahami tatacara penghapusan piutang yang dimiliki, baik menggunakan mekanisme dalam PMK 82/2019 maupun menggunakan PMK 137/2022.



**Implikasi:**

Bidang Penilaian : Materi Sosialisasi tidak tersampaikan dan tidak dapat melakukan pengukuran peningkatan pemahaman para Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah terkait ketentuan-ketentuan di Bidang Penilaian

Bidang PKN : Materi sosialisasi tidak dapat disampaikan secara komprehensif

Bidang Lelang : Pelaksanaan lelang belum optimal dilaksanakan oleh seluruh stakeholders

Bidang Piutang Negara : Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kesulitan untuk melakukan pengelolaan piutangnya.

**Akar Masalah:**

Bidang Penilaian : Kegiatan survey lapangan dan Sosialisasi peraturan yang tidak dapat dipastikan jadwalnya.

Bidang PKN : Keterbatasan DIPA Perjadiin pada satker berdampak ketidakhadiran satker dalam edukom secara luring.

Bidang Lelang : Minat dan pengetahuan instansi/masyarakat umum terhadap mekanisme lelang yang masih terbatas

Bidang Piutang Negara : Lokasi Stakeholder yang tersebar pada 2 Provinsi di Kalimantan, serta keterbatasan anggaran pada stakeholder berdampak ketidakhadiran satker dalam edukom secara luring maupun apabila dilaksanakan secara daring terganggu oleh kehandalan jaringan internet pada lokasi Stakeholder.

**Tindakan yang telah dilakukan:**

1. Pada Bidang PKN, telah melaksanakan secara rutin Bincang Aset dan Lab Aset sepanjang tahun 2025.
2. Pada Bidang PN
  - a. Telah menyusun KAK pada Triwulan I Tahun 2025.:
  - b. Melaksanakan kegiatan rutin Kupas PN pada setiap bulan untuk membahas monitoring dan evaluasi proges pengurusan Piutang Nagara pada masing-masing KPKNL;
  - c. Bersama KPKNL berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sosialisasi pengurusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN;
  - d. Membuka komunikasi intensif dengan *stakeholder* apabila memerlukan pendampingan dan asistensi terkait pengurusan Piutang Negara maupun Piutang Daerah.



3. Pada Bidang Penilaian : Berkoordinasi dengan para PFPF sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi. Dan berkoordinasi dengan satker yang bermohon sebelum melaksanakan penilaian
4. Pada Bidang Lelang telah melaksanakan edukom pada semester I dan II Tahun 2025.

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Bidang PKN rutin melaksanakan Bincang Aset dan Lab Aset rutin setiap bulan.
2. Bersama dengan KPKNL maupun anggota PUPN memberikan sosialisasi kepada *Stakeholder* dalam rangka pengurusan Piutang Negara maupun Piutang Daerah;
3. Membuka saluran-saluran komunikasi baik formal maupun informal kepada *Stakeholder* apabila memerlukan pendampingan dan asistensi apabila terdapat kendala dalam pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
4. Memberikan pembinaan kepada KPKNL melakukan penggalian potensi penyerahan BKPN dan penyelesaian BKPN baik pada Piutang Negara maupun Piutang Daerah..
5. Bidang Penilaian telah melaksanakan edukom Tahun 2025.
6. Bidang Lelang telah melaksanakan edukom Tahun 2025.

**8. Tingkat kompetensi penilai pemerintah**

Nama Unit	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
	3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	Max/TLK
Realisasi	96	96	96	96	96	96	
Capaian	137,14%	137,14%	137,14%	137,14%	<b>137,14</b>	<b>137,14</b>	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum dapat dilakukan karena tingkat kompetensi penilai pemerintah baru dimasukkan sebagai IKU mulai tahun 2025. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.



Tingkat kompetensi penilai pemerintah

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70				-	96(137,14%)
2024	-	-		-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Isu Utama:**

1. Sebagai Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, Kanwil DJKN perlu melakukan Bimbingan Teknis secara berkala untuk peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah, khususnya untuk Penilai Pemerintah di luar DJKN.
2. PFPF pada Instansi Pengguna tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan LOGIN maupun kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Penilaian

**Implikasi:**

1. Para Penilai Pemerintah di lingkungan Non Kementerian Keuangan dituntut untuk memiliki bekal atau modal yang standar melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan sehingga bimbingan teknis perlu segera dilakukan agar produk yang dihasilkan oleh Penilai Pemerintah Pada Instansi Pengguna memiliki standar yang sama dengan produk yang dihasilkan Penilai DJKN.
2. LOGIN yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan sejalan dengan adanya program dari Kantor Pusat dengan nama rincian output Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah yang disertai dengan dukungan anggaran. Dengan adanya dukungan anggaran ini, Bidang Penilaian dapat melakukan koordinasi, bimbingan dan/atau asistensi yang dibutuhkan oleh PFPF di Instansi Pengguna untuk dapat meningkatkan kompetensinya.



**Akar Masalah:**

1. Adanya perbedaan kompetensi pada PFPP di DJKN dan PFPP di Instansi Pengguna karena tidak semua PFPP di Instansi Pengguna memiliki latar belakang pendidikan di Bidang Penilaian.
2. Informasi yang tidak tersampaikan kepada PFPP atau karena disebabkan adanya penugasan lain seperti survei lapangan atau diklat yang menyebabkan Penilai Pemerintah tersebut tidak berpartisipasi

**Tindakan yang telah dilakukan:**

1. Melaksanakan kegiatan Dialog Penilaian (LOGIN) setiap bulan bersama para PFPP di KPKNL dan PFPP di Instansi Pengguna yang terdiri dari Penilai Pemerintah pada Provinsi Daerah dan Penilai Pemerintah pada Kejaksaan Tinggi sebagai sarana untuk berdiskusi mengenai penilaian serta isu-isu lain yang relevan;
2. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara langsung melalui grup whatsapp maupun melalui pesan pribadi dengan para PFPP di KPKNL dan PFPP di Instansi Pengguna;
3. Mendukung para PFPP di Instansi Pengguna untuk melakukan kegiatan Penilaian pada unit masing-masing dan melaksanakan kegiatan *peer review* atas konsep laporan penilaian serta kaji ulang atas konsep laporan yang telah disampaikan kepada pemohon;
4. Bidang Penilaian selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dan memastikan semua PFPP pada Instansi Pengguna dapat mengikuti kegiatan tersebut;
5. Bidang Penilaian memberikan asistensi secara intensif secara teknis kepada PFPP di Instansi Pengguna untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam melaksanakan kegiatan penilaian;
6. Dalam kegiatan LOGIN, bidang penilaian berupaya meminta tanggapan atau masukan dari PFPP di KPKNL ataupun Instansi Pengguna (Instansi Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi);
7. Melakukan pemantauan permohonan penilaian dari koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah terkait objek penilaian yang berada di daerah terpencil yang dilaksanakan oleh PFPP di KPKNL dalam lingkup Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah.

Upaya-upaya yang dilakukan sebagian besar dilakukan secara daring sebagai wujud efisiensi penggunaan sumber daya sehingga anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian target kinerja dapat lebih efisien.



**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Melakukan pembekalan materi (ilmu penilaian) kepada instansi penggunaan khususnya kejaksaan direncanakan triwulan I dan II ;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap hasil laporan penilaian yang dilakukan peer review dan kaji ulang;
3. Melakukan sosialisasi peraturan/ketentuan terbaru di bidang penilaian melalui penjabaran metode penilaian yang terbaru;

**9. Persentase barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan**

Nama Unit	Penerapan tata kelola aset yang efektif						
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	26,10	208,80	208,80	313,20	522	522	Max/TLK
Realisasi	63	307	307	421	589	589	
Capaian	4.827,59	367,58	367,58	134,42	<b>112,84%</b>	<b>112,84%</b>	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	522	-	100%		-	589(112,84%)
2024	100%	-	100%		-	132.86%(120%)
2023	100%	-	100%	100%	-	177.20%
2022	100%	-	100%	100%	-	114.05%
2021	100%	-	100%	-	-	108.14%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.



**Isu Utama:**

Bidang tanah BMN yang menjadi target tahun 2025 tidak semuanya berstatus *clean and clear* (K1), selain itu terdapat isu efisiensi anggaran di seluruh K/L termasuk Satuan Kerja yg menjadi Subyek Sertifikasi dan BPN.

**Implikasi:**

Bidang tanah yang belum *clean and clear* dapat menghambat penerbitan sertipikat BMN berupa tanah. Permasalahan hukum yang terjadi di lapangan memerlukan penanganan yang beragam tergantung dari permasalahan yang terjadi sehingga penanganan memerlukan perhatian khusus dan Kerjasama dari berbagai pihak

**Akar Masalah:**

Hasil verifikasi bidang tanah yang ditetapkan sebagai target masih terdapat bidang tanah yang tidak *clean and clear*.

**Tindakan yang telah dilakukan:**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara dan sertifikasi BMN secara berkala, dengan hasil laporan percepatan sertifikasi bulan Februari 2025 melalui ND-282/WKN.12/2025, bulan Maret 2025 melalui ND-400/WKN.12/2025, bulan April melalui ND-422/WKN.12/2025, bulan Mei melalui ND-559/WKN.12/2025, dan bulan Juni melalui ND-657/WKN.12/2025;
2. Menyampaikan permohonan dukungan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Sertifikasi kepada Kanwil BPN Prov. Kalteng melalui S-26/WKN.12/2025 dan Kanwil BPN Prov. Kalsel melalui S-39WKN.12/2025;
3. Melakukan validasi sertipikat tanah pada SIMAN secara berkala;

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.;
2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Kalimantan Selatan dan Kanwil BPN Kalimantan Tengah;
3. Peningkatan sinergi dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja;
4. Kolaborasi yang lebih inten antara DJKN dengan Kantor Pertanahan dan pihak terkait, untuk menyelesaikan target sertifikasi BMN berupa tanah;
5. Peningkatan pemahaman penatausahaan BMN kepada KPKNL dan satuan kerja.



#### 10. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Nama Unit	Penerapan tata kelola aset yang efektif						
	4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15	50	50	75	100	100	Max/TLK
Realisasi	101,67	113,39	113,39	111,26	120	120	
Capaian	677,78%	226,78%	226,78%	148,25%	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	-	-	120%(120%)
2024	100%	-	100%	-	-	127.78%(120%)
2023	100%	-	100%	-	-	136.11%
2022	100%	-	100%	-	-	130.27%(120%)
2021	100%	-	100%	-	-	118.75%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

#### Isu Utama:

Masih terdapat Satuan Kerja yang menjadi target evaluasi kinerja BMN, belum memiliki pemahaman yang memadai terkait evaluasi kinerja BMN, hal ini berdampak terkendalanya pengumpulan data/informasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi kinerja BMN.



**Implikasi:**

Hasil dari evaluasi kinerja merupakan rekomendasi terhadap aset yang dinilai. Rekomendasi ini memerlukan tindak lanjut dari satuan kerja agar kinerja BMN lebih baik.

**Akar masalah:**

Penjelasan tentang akar masalah atau hambatan yang menjadi penyebab munculnya isu utama yang bersifat negatif. Akar masalah yang disampaikan diprioritaskan pada permasalahan yang bersifat internal Kementerian Keuangan, misalnya terkait permasalahan organisasi, teknologi informasi (IT), proses bisnis, regulasi internal, dan lain-lain.

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Sosialisasi peningkatan pemahaman satuan kerja terkait evaluasi kinerja yang dilakukan melalui bincang aset yang dilaksanakan sesuai undangan nomor: UND-16/WKN.12/2025 tanggal 17 Januari 2025, nomor: UND-29/WKN.12/2025 tanggal 12 Februari 2025, dan Nomor: UND-50/WKN.12/2025 tanggal 14 Maret 2025.
2. Mengadakan kegiatan Laboratorium Aset pada 25 Februari 2025(UND-34/WKN.12/2025), 11 Juni 2025 (UND-119/WKN.12/2025), 16 September 2025 (UND-203/WKN.12/2025)
3. Menyampaikan pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja BMN sesuai nota dinas nomor: ND-166/WKN.12/2025 tanggal 4 Februari 2025
4. Melakukan validasi dan *quality assurance* terhadap evaluasi kinerja yang dilakukan oleh KPKNL

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Pemantauan secara berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja BMN
2. Pelaksanaan bimbingan dan sosialisasi melalui kegiatan bincang aset dan laboratorium asset

**11. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara**

Nama Unit	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara						
T/R	Q1	Q2	SM. I	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5	14	14	24	36	36	Max/TLK
Realisasi	5,6	15,60	15,60	24,50	128,90	128,90	
Capaian	112%	111,43%	111,43%	102,08%	<b>358,06%</b>	<b>357,06%</b>	



Capaian IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet sebesar 128,9 didapatkan dari penyelesaian berkas melalui tahapan:

- penerbitan SPPNL sebanyak 3 berkas dengan bobot masing-masing berkas 1,2
- penerbitan PSBDT sebanyak 31 berkas dengan bobot masing-masing berkas 1,1
- penerbitan SKPPN sebanyak 2 berkas dengan bobot masing-masing berkas 1,1
- penerbitan PPDTO sebanyak 89 berkas dengan bobot masing-masing senilai 1,0

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	36	-	100%			128,90(357,06%)
2024	73%	-	100%			3.17%(120%)
2023	100%	-	100%	100%	-	122.86%(120%)
2022	100%	-	100%	100%	-	120%
2021	100%	-	100%	100%	-	113.33%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

#### Isu Utama:

Terdapat banyak BKPN yang kriteria penyelesaiannya telah diatur melalui PMK 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sehingga banyak piutang negara yang dalam proses penyelesaian oleh K/L belum dapat diakui sebagai capaian realisasi penyelesaian berkas piutang negara.

#### Implikasi:

Perlu dilaksanakan langkah langkah penggalian potensi piutang negara baru pada BPJS Ketenagakerjaan maupun dari K/L yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh PUPN sehingga dapat menambah capaian kinerja.



**Akar masalah:**

Penurunan pembayaran angsuran dari debitur yang menyebabkan minimnya pelunasan di tahun berjalan

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Pelaksanaan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk penggalian potensi piutang dari BPJS Ketenagakerjaan dan dilanjutkan dengan pertemuan bersama yang dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 April 2025.
2. Pertemuan dengan BPKAD Pemprov. Kalimantan Tengah dalam rangka penggalian potensi penyerahan pengurusan Piutang Daerah.
3. Telah dilaksanakan PKS dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengurusan piutang daerah.
4. Mendorong agar KPKNL memastikan berkas kasus piutang negara (BKPN) diteliti sebelum diterima;
5. Mendorong agar KPKNL melaksanakan Pemeriksaan Piutang Negara guna menyelesaikan BKPN lama;
6. Mendorong agar KPKNL terus melaksanakan penggalian potensi dan melakukan pemetaan terhadap debitur aktif yang berpotensi untuk meningkatkan setoran pelunasan piutang negara;

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Melakukan pendampingan kepada KPKNL terkait mengenai penggalian potensi Piutang pada K/L.
2. Melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan potensi penyerahan piutang.
3. Agar KPKNL dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bentuk optimalisasi kewenangan PUPN dalam melaksanakan pemeriksaan debitur sehingga dapat terlaksana penyelesaian BKPN;
4. Bersama KPKNL melakukan penggalian potensi Piutang Daerah (Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten) setempat dan/atau Piutang K/L melalui kegiatan sosialisasi/bimtek/koordinasi langsung dengan instansi target guna memperoleh penyerahan BKPN baru;
5. Bersama KPKNL melakukan penggalian potensi penyerahan BKPN dari lembaga sui generis BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga sui generis lainnya.



## 12. Tingkat Layanan Kualitas Penilaian

Nama Unit	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/Average
Realisasi	112,52%	107,50%	107,50%	120,25%	136,1%	119,09%	
Capaian	160,74	153,57	153,57	171,78	<b>194,28</b>	<b>170,12</b>	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

### Tingkat Layanan Kualitas Penilaian

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	70	-	70	-	-	119,09170,12%
2024	78	-	-	-	-	98.17(120%)
2023	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

#### Isu Utama:

Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam, kecuali permohonan penilaian yang memerlukan bantuan tenaga penilai dari unit lain.



Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesainya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilain selesai dan disampaikan ke pemohon.

**Implikasi:**

Pada KPKNL dengan permohonan penilaian yang tinggi namun SDM dan anggaran yang kurang memadai dapat mempengaruhi capaian IKU.

**Akar masalah:**

1. Formula perhitungan capaian IKU yang dimulai dari surat/nota dinas masuk permohonan penilaian dan selesai saat laporan penilaian disampaikan kepada pemohon dapat menyebabkan capaian IKU yang kurang optimal pada KPKNL yang permohonan penilaiannya tinggi namun SDMnya kurang memadai.
2. Salah satu faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu kurangnya PFPP untuk melaksanakan permohonan penilaian yang diterima oleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

**Tindakan yang telah dilakukan:**

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan memberikan bantuan tenaga penilai apabila dibutuhkan
2. Melakukan pemantauan capaian IKU melalui tautan yang disediakan oleh Kantor Pusat
3. Melakukan pemantauan dan mengingatkan capaian IKU yang kemudian disampaikan ke KPKNL tiap awal bulan
4. Dalam melakukan Kaji Ulang Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah menggunakan aplikasi excel yang telah diolah sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan kaji ulang dan hasilnya optimal.
5. Melakukan koordinasi secara periodik dan konsultasi intensif dengan stakeholder terkait dengan permohonan yang akan diajukan terkait dengan syaratnya dan objek yang akan diajukan penilaian.
6. Dalam proses Kaji Ulang jika terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan kembali oleh PFPP, Pengkajul memberikan catatan didalam laporan analisis kajiul.



7. Pelaksanaan peer review PFPF dari KPKNL mengikutsertakan PFPF dari KPKNL lain atau PFPF dari Kanwil.

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Memberikan bantuan tenaga penilai kepada KPKNL ketika dibutuhkan
2. Melakukan pemantauan capaian IKU
3. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan penilaian kepada stakeholder melalui pemberian edukasi dan sosialisasi terkait peraturan penilaian yang baru.
4. Memberikan asistensi apabila dibutuhkan oleh stakeholder dalam penggunaan aplikasi SIP untuk mengajukan permohonan penilaian.
5. Memastikan bahwa seluruh proses kegiatan penilaian terekam dan diinput pada aplikasi SIP.
6. Memastikan bahwa seluruh laporan penilaian yang disusun dilakukan kaji ulang dan mendapatkan nilai kaji ulang melampaui target kinerja.

**13. Persentase Produktivitas lelang**

Nama Unit	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
	5c-CP Persentase produktivitas lelang						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	61,10%	77,75%	77,75%	101,68%	120%	120%	
Capaian	203,68	194,36	194,36	145,25%	<b>150%</b>	<b>150%</b>	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Persentase produktivitas lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2025</b>	80%	-	80%	-	-	120%(150%)
<b>2024</b>	89%	-	34%	-	-	120%(120%)
<b>2023</b>	80%	-	34%	-	-	105%(131.25%)
<b>2022</b>	36%	-	34%	-	-	47.34%(129%)
<b>2021</b>	35%	-	34%	-	-	51.25%(146.43%)



Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Isu Utama:**

Capaian produktivitas Lelang telah melebihi target bulan Juli 2025, sehingga perlu mempertahankan dan meningkatkan tingkat kinerja produktivitas lelang dari sisi rekuensi dan jumlah Lelang laku pada periode berikutnya

**Implikasi:**

Peningkatan frekuensi dan jumlah lelang laku akan meningkatkan realisasi capaian produktivitas lelang.

**Akar masalah:**

Perlunya konsistensi kinerja pada periode berikutnya

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Pelaksanaan pembinaan ke KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara rutin pada Triwulan II Tahun 2025.

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalian potensi lelang;
2. Melakukan pembinaan ke KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan;

**14. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Nama Unit	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
	6a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	



Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%					120%(120%)
2024	100%					120%(120%)
2023	100%	95	95	95	-	100%(106.64%)
2022	95.50%	95	95	95	-	98.12%
2021	95.50%	95	95	95	-	102%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

#### Isu Utama:

1. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
2. Implementasi SBK di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) bahwa saat ini indikator efisiensi hanya memperhitungkan penggunaan RO SBK dan Efisiensi RO SBK (RO selain SBK tidak dihitung nilai efisiensinya).
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

#### Implikasi:

1. Implementasi Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022;
2. Kemudahan dalam melakukan revisi anggaran kewenangan Kanwil Perbendaharaan;
3. Implementasi S-151/KPN.2602/2023.



**Akar masalah:**

1. Satuan kerja diberikan kesempatan 1 kali revisi kewenangan Kanwil Perbendaharaan setiap triwulan sehingga rencana kerja harus disusun dengan baik.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta penilaian IKPA TA 2025.
3. Penyerapan anggaran Belanja Barang sampai dengan Triwulan IV TA 2024 pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga nilai pada indikator penyerapan anggaran belum bisa maksimal

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin setiap bulan;
2. Permintaan Rencana Kerja Bagian/Bidang dan usulan revisi anggaran Triwulan IV pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
3. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan.
4. Pengisian realisasi capaian output sampai dengan Bulan November 2025 sebagai data dukung penyusunan laporan SAKTI dan e-monev Bappenas

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Melakukan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan organisasi dan pencapaian Nilai IKU IKKPA pada komponen Halaman III DIPA;
2. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait rencana kerja triwulan IV.

**15. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa**

Nama Unit	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.



Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%					120%(120%)
2024	100%					120%(120%)
2023	100%	95	95	95	-	100%(106.64%)
2022	95.50%	95	95	95	-	98.12%
2021	95.50%	95	95	95	-	102%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Isu Utama:**

Terdapat 5 indikator yaitu : SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

**Implikasi:**

Untuk meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

**Akar Masalah:**

IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal.

**Tindakan yang telah dilakukan:**

1. Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan monitoring dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

**Rekomendasi rencana aksi:**

Melakukan updating data PBJ secara periodik pada aplikasi-aplikasi pengadaan.



**16. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Nama Unit	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	32,44%	68,37%	68,37%	94,42%	100%	100%	
Capaian	120	170,93	170,93	120%	120%	120%	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	-	-	94%	-	100%(120%)
2024	100%	-	-	-	-	120%(120%)
2023	100%	-	-	-	-	120%(120%)
2022	100%	-	-	-	-	120%(120%)
2021	100%	-	-	-	-	120%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Isu utama:**

1. Sertifikat pelatihan berupa e-sertifikat yang dikirim langsung ke akun pegawai baik melalui HRIS maupun [semantik.bppk.kemenkeu.go.id](http://semantik.bppk.kemenkeu.go.id), pengelola kepegawaian tidak punya alat untuk memonitor sertifikat yang sudah diterima oleh pegawai.
2. Persentase untuk pengembangan kompetensi pegawai sudah melebihi target namun pegawai masih harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Implikasi:**

Walaupun realisasi IKU sampai dengan Bulan Desember telah tercapai namun pegawai masih harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Akar masalah:**

1. Ada pegawai yg tidak aktif untuk melaksanakan *e-learning open class* yang ditawarkan melalui [klc2.kemenkeu.go.id](http://klc2.kemenkeu.go.id) dan [diklatdjkn.kemenkeu.go.id](http://diklatdjkn.kemenkeu.go.id)
2. Kesulitan pencatatan/ pendataan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh pegawai.
3. Pelaksanaan sharing knowledge masih dilaksanakan guna memfasilitasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan.

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Melakukan pendataan sertifikat diklat
2. Mengusulkan diklat secara e-learning dengan tema yang beragam sehingga pegawai berminat utk diklat secara e-learning
3. Membuat Undangan pelaksanaan sharing knowledge pegawai sesuai jadwal

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Memonitor Capaian realisasi iku setiap triwulan
2. Mengusulkan diklat secara e-learning dengan tema yang mengutamakan sesuai dengan tusinya.
3. Melakukan pendataan dan pengumpulan sertifikat diklat.

**17. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan**

Nama Unit	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	Max/Average
Realisasi	5,23	6,73	5,98	6,23	6,57	6,09	
Capaian	147,37	189,47	168,45	175,44	<b>185,07</b>	<b>171,45</b>	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.



Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	3.55%				-	6,09%(171,45%)
2024	3.55%				-	5.23%(120%)
2023		-	-	3.55	-	
2022		-	-	3.5	-	
2021					-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Isu Utama:**

Penipuan lelang mengatasnamakan pegawai Kanwil DJKN/KPKNL.

**Implikasi:**

Untuk mencegah hal tersebut, upaya yang dilakukan dengan menerapkan Employee Advocacy (EA) dan edukasi kepada masyarakat.

**Akar masalah:**

Apabila Pemangku EA di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tidak melakukan amplifikasi konten.

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Memenuhi Agenda Setting sesuai panduan (topik dan jadwal) dari Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan komunikasi yang dilakukan Kanwil dan KPKNL.
3. Menyampaikan laporan realisasi taktik yang dilaksanakan Kanwil dan KPKNL ke Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.



**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Mengamplifikasi konten medsos Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan SMI pada media sosial kantor
2. Melaporkan amplifikasi pada spreadsheet pelaporan eksis vertikal Kemenkeu
3. Mendorong pegawai untuk melakukan aktivasi EA

**18. Indeks penanganan permasalahan hukum**

Nama Unit	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
	7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	113,92	114,77	114,77	114,20	114,26	114,26	
Capaian	113,92	114,77	114,77	114,20	114,26	114,26	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100				-	114,26(114,26%)
2024	2024	3.55%				-
2023	2023		-	-	3.55	-
2022	2022		-	-	3.5	-
2021	-	-	-	-	-	-

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.



**Isu Utama:**

Penanganan permasalahan hukum yang efektif untuk mengendalikan kerugian organisasi.

**Isu Positif**

1. Menjamin kepastian hukum atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN.
2. Ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi.

**Isu Negatif**

Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di Bidang Humum sebagai petugas penanganan perkara (terkadang jumlah perkara tidak sebanding dengan ketersediaan petugas penanganan perkara).

**Implikasi:**

1. Terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Untuk permasalahan hukum terkait lelang, penanganan perkara ini untuk memastikan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang benar-benar telah memenuhi syarat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan cacat hukum dan penunjukan pemenang lelang juga sah secara hukum.

**Akar Masalah:**

1. Dalam pelaksanaan lelang terkadang memunculkan resiko dan permasalahan hukum dari para pihak yang terlibat di dalamnya sehingga ada beberapa yang berujung di meja persidangan dengan mengajukan gugatan.
2. Permasalahan hukum yang tidak ditangani dengan cepat dan tepat dapat mengganggu proses bisnis unit kerja, menimbulkan risiko hukum jangka panjang, dan bahkan berpotensi merugikan negara secara finansial maupun reputasi

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Peningkatan kompetensi penanganan permasalahan hukum pada petugas penanganan perkara.
2. Pelaksanaan pendampingan penanganan perkara oleh Biro Advokasi Direktorat Hukum dan Humas.



3. Pelaksanaan pembinaan penganan perkara oleh Biro Advokasi Direktorat Hukum dan Humas (UND-42/WKN.12/2025 tanggal 7 Maret 2025).
4. Pembinaan untuk penyamaan data (rekonsiliasi) perkara aktif di KPKNL Palangkaraya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025;
5. Mengikuti Sosialisasi KMK No.167 tahun 2025 tentang Pelimpahaan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Kementerian Keuangan secara daring pada tanggal 31 Agustus 2025;
6. Mengikuti kegiatan Legal Talks Episode 01 tanggal 11 September 2025 secara daring;
7. Melaksanakan pembinaan ke KPKNL melalui Piloting Pembinaan Terpadu pada bulan September 2025
8. Penguatan Literasi Hukum di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan nara sumber dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru
9. Mengikuti Evaluasi Peraturan Perundangan dan Efektifitas Kebijakan Bidang KN, Penilaian dan Lelang pada tanggal 25 Nopember 2025
10. Melaksanakan Pembinaan Akhir Tahun terkait permasalahan hukum dan penanganan perkara pada KPKNL Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2025

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Pelaksanaan pembinaan penganan perkara secara rutin oleh Biro Advokasi Direktorat Hukum dan Humas dan Seksi Hukum Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
2. Meminta pendampingan penanganan perkara oleh Biro Advokasi Direktorat Hukum dan Humas atas perkara yang membutuhkan asistensi

**19. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko**

Nama Unit	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	92,45	98.13	98.18	98,65	98,94	98,94	
Capaian	115.56	122,66	122,73	123,31	<b>123,67</b>	<b>123,67</b>	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.



Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	98,94(123,67%)
2024	85	-	-	-	-	99.02(116.50%)
2023	80	-	-	-	-	98.82(123.53%)
2022	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Isu Utama:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

**Implikasi:**

1. Implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022
2. Pelaporan dilakukan triwulanan, sedangkan pengukuran indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko dilakukan secara tahunan

**Akar masalah:**

1. Terjadi pergantian pegawai baru selaku PIC Kinerja Organisasi, sehingga diperlukan diklat untuk menunjang pelaksanaan tuisi
2. Diperlukan kompetensi (kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam pengelolaan IKMR ini (Manajemen Kinerja Organisasi , Manajemen Kinerja Peegawai) dan Manajemen Risiko.



3. Angka capaian tersebut diperoleh dari komponen Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi (30%) dan Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%), sementara sampai saat ini Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai (30%) belum diperoleh dari Kantor Pusat DJKN

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan seluruh KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan tengah.
2. Mengusulkan diklat untuk para pengelola kinerja dan pengelola risiko.
3. Secara rutin melakukan DKRO dan monev capkin tiap bulan.

**Rekomendasi rencana aksi:**

Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan seluruh KPKNL di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan tengah

**20. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti**

Nama Unit	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75,5%	82,5%	82,5%	95,30%	95,30%	95,30%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	132,45	121,21	121,21	111,42%	<b>104,93%</b>	<b>104,93%</b>	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum dapat dilakukan karena Indeks kepuasan pengguna layanan baru dimasukan sebagai IKU mulai tahun 2025. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.



Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	98,94(123,67%)
2024	85	-	-	-	-	99.02(116.50%)
2023	80	-	-	-	-	98.82(123.53%)
2022	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

**Isu Utama:**

1. Mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
2. Pemeriksaan kaji ulang secara manual yang sangat rawan kesalahan
3. Batas waktu kaji ulang yang tidak memperhitungkan banyaknya jumlah laporan penilaian yang diajukan kaji ulang pada waktu yang sama

**Implikasi:**

Kesalahan yang sangat mungkin terjadi karena kurang cermat dan teliti dalam melakukan kaji ulang.

**Akar masalah:**

1. Belum adanya laporan yang tersusun otomatis secara online yang memudahkan pengkaji ulang dalam memeriksa karena memiliki format serta susunan lampiran yang sama.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM PFPP sesuai dengan beban kerjanya.

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

1. Menyampaikan Nota Dinas kepada PFPP dan pegawai yang ditunjuk sebagai pengkaji ulang untuk lebih cermat dan lebih teliti dalam setiap melaksanakan kaji ulang dengan berpedoman kepada ketentuan terkait melaksanakan kendali mutu dan kaji ulang.
2. Melaksanakan IHT kepada PFPP dan pegawai yang ditunjuk sebagai pengkaji ulang terkait aturan dan ketentuan Kaji Ulang yang menjadi tanggung jawab Kanwil DJKN.



3. Melaksanakan FGD dengan melibatkan PFPP dan pegawai yang terlibat dalam penilaian pada KPKNL di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah terkait dengan hasil laporan analisis kaji ulang.

**Rekomendasi rencana aksi:**

1. Menyampaikan kepada para pengkaji ulang agar lebih cermat dan teliti
2. Melaksanakan IHT untuk menginternalisasi aturan terkait kaji ulang kepada para pengkaji ulang
3. Melaksanakan FGD kepada PFPP dan pegawai yang terlibat dalam penilaian

**Dukungan untuk Program Prioritas Presiden**

Dalam upaya pencapaian realisasi kinerja selama Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan yang mendukung terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll. Adapun penjelasan atas kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Program prioritas terkait UMKM dan Koperasi**

Bidang Lelang Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menginisiasi pelaksanaan Lelang Serentak Harat Banar yang mana salah satu produk unggulan yang diikutsertakan adalah produk UMKM. Guna mensukseskan pelaksanaannya, tim Bidang Lelang secara intensif melaksanakan pendampingan kepada para pelaku UMKM binaan sampai dengan pengajuan dokumen usulan lelang. Selain itu, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah juga melaksanakan sosialisasi bertema edukasi UMKM pada 16 Juni 2025 dengan menghadirkan para narasumber dari perwakilan Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan yang dihadiri para pelaku UMKM bahkan dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Materi yang dibahas dalam edukasi UMKM tersebut antara lain tata cara lelang sukarela UMKM, panduan implementasi Coretax bagi wajib pajak, pembiayaan UMKM, dan bersama Bea Cukai, UMKM bisa ekspor.

**2. Program Prioritas terkait Pembangunan Desa**

Pada Tahun 2025 Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menggalakkan pelaksanaan bimbingan teknis mekanisme lelang aset desa dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Seluruh desa di provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah berhasil diundang dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan pada Bulan Mei dan Oktober 2025 dan dilanjutkan dengan pendampingan persiapan berkas usulan dan pelaksanaan lelang. Hasilnya, pada



10 Oktober 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berhasil melaksanakan Lelang Serentak Aset Desa pertama di Indonesia yang berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta peningkatan perekonomian desa secara umum.

### **3. Identifikasi BMN yang berpotensi untuk pendirian SPPG, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, dan Sekolah rakyat**

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pemerataan kesejahteraan masyarakat, saat ini pemerintah telah mendesain sejumlah program prioritas untuk memacu gerak roda perekonomian yang lebih merata ke berbagai wilayah di Indonesia. Program prioritas itu di antaranya ialah Makan Bergizi Gratis alias MBG, Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan sarana dan prasarana sebagai dukungan operasional dalam pelaksanaan program ini. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah dengan digunakannya Barang Milik Negara (BMN) sebagai prasarana pendukung kegiatan tersebut. Konsep pemanfaatan BMN adalah bentuk nyata dari dukungan DJKN dengan diterbitkannya Persetujuan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa. Sebelum persetujuan diterbitkan dilakukan proses penilaian untuk rekomendasi nilai wajar sewa yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal DJKN. Untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan dan Tengah, proses ini telah dilakukan oleh KPKNL Banjarmasin untuk pendirian SPPG. Selain itu juga telah dilakukan identifikasi BMN yang berpotensi untuk pendirian SPPG, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

### ***Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)***

Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah merupakan salah satu unit kerja yang ikut berperan serta dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-18/WKN.12/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Atas dasar tersebut beberapakah kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung implementasi PUG ini diantaranya adalah:

#### **Penyusunan Buku Saku PUG**

Agar pengetahuan terkait pengarusutamaan gender ini dapat lebih dipahami oleh semua pegawai lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Duta PUG bersama dengan tim sekretariat PUG telah menyusun buku saku PUG sebagai salah satu media komunikasi informasi dan edukasi. Buku saku ini telah disampaikan kepada seluruh pegawai di jajaran Kanwil DJKN



Kalimantan Selatan dan Tengah melalui Nota Dinas Nomor ND-612/WKN.12/2025 tanggal 25 Mei 2025.



### **PREMI, Preferensi Mutasi Internal**

Sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mampu berkinerja secara optimal dalam memberikan pelayanan adalah dengan menjaga keseimbangan posisi pegawai dalam mendukung kinerja di setiap unitnya. Penempatan/pemindahan pegawai pada bagian/bidang yang tepat menjadi arah pilihan kebijakan. Kondisi penempatan dan pemindahan pegawai diupayakan agar setiap bagian/bidang dapat terpenuhi sesuai dengan analisis beban kerjanya (ABK). Selain itu juga mengelola kondisi mental dan psikis dari pegawai yang ditempatkan pada posisi kedudukannya. Pegawai yang dalam kondisi sehat dan bahagia akan mendukung kinerjanya. Salah satu dukungan dari Bagian Umum Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dengan mengembangkan PREMI, Preferensi Mutasi Internal bagi pegawai untuk menyesuaikan minatnya berkinerja pada bagian/bidang yang diinginkannya.

### **Penyajian data terpilah untuk realisasi lelang produk UMKM pada pelaporan ALCo**

Dalam pelaporan rutin ALCo baik untuk regional Kalimantan Selatan maupun regional Kalimantan Tengah terkait kinerja lelang, terdapat penyajian data yang secara khusus memisahkan realisasi keterlibatan UMKM dalam mekanisme lelang. Hal tersebut sekaligus dapat



digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kontribusi lelang dalam mendukung program pemberdayaan UMKM guna meningkatkan perekonomian regional.

### **Pelaksanaan webinar bertema tata kelola lelang yang inklusif dan responsif gender**

Pada bulan Maret 2025, Bidang Lelang, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menginisiasi pelaksanaan webinar bertema tata kelola lelang yang inklusif dan responsif gender dengan menghadirkan salah Pejabat Lelang Kelas I wanita dari KPKNL Banjarmasin dan menyajikan materi terkait bagaimana mekanisme lelang mengakomodir isu inklusifitas dan *gender equality*, antara lain dengan menyediakan sarana prasarana yang ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus, kursi/ruang/pelayanan khusus untuk wanita hamil dan menyusui, termasuk memfasilitasi pemasaran produk masyarakat berkebutuhan khusus melalui mekanisme lelang.



### **Pelaksanaan lelang produk anak dengan *down syndrom* pada Lelang Serentak Harat Banar**

Pada Lelang Serentak Harat Banar di tanggal 10 Oktober 2025, turut dijual pula 10 (sepuluh) produk batik sasirangan dari anak dengan *down syndrom*, dimana keseluruhan produk tersebut berhasil terjual dengan peningkatan nilai jual dari nilai limit mencapai 117,6%. Salah satu produk batik sasirangan tersebut bahkan dibeli oleh Bupati Tabalong. Hal ini menunjukkan bentuk kepedulian dan dukungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada tumbuh kembang kelompok rentan, khususnya anak dengan *down syndrom*.



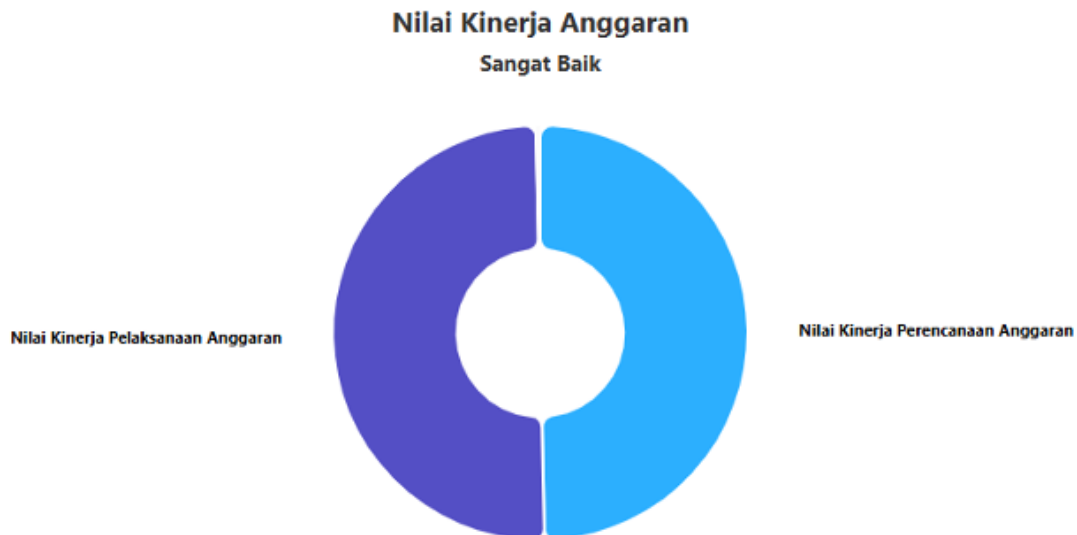


## **B. Realisasi Anggaran**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil evaluasi kinerja anggaran yang didapatkan dari dua komponen, yaitu:

1. Nilai evaluasi kinerja anggaran dari aplikasi SMART dengan bobot 60%
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari aplikasi OM-SPAN dengan bobot 40%

IKPA adalah alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan untuk mengukur kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.



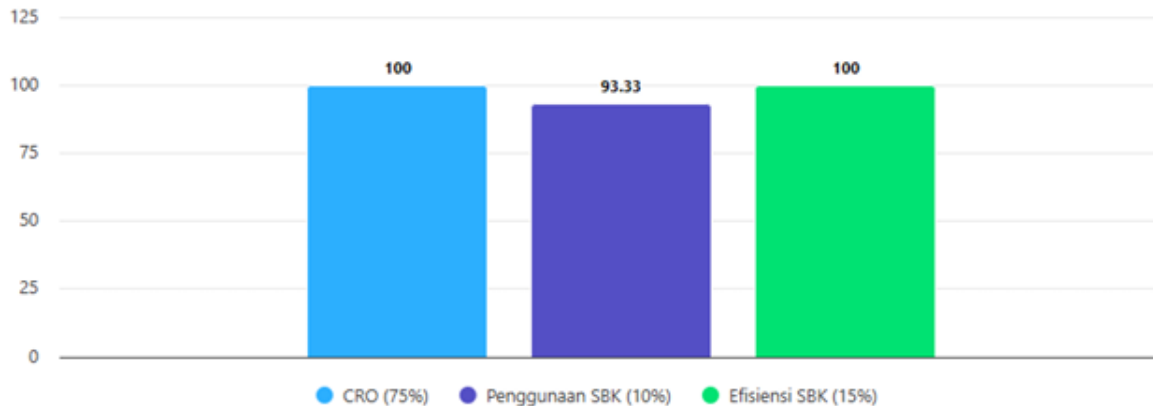
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah nilai yang didapatkan dari variabel efektivitas dan efisiensi. Variabel efektivitas dinilai dari capaian Sasaran Program, Sasaran Strategis, dan RO. Sementara variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK, baik SBKK maupun SBKU.

NKPA merupakan bagian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. IKPA merupakan alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan untuk mengukur kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan salah satu aspek yang menjadi acuan dalam menentukan apakah anggaran yang diberikan telah dikelola dan dijalankan dengan baik. Aspek ini mencakup 2 indikator, yaitu indikator Revisi DIPA dan Deviasi Hal. III DIPA



### Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

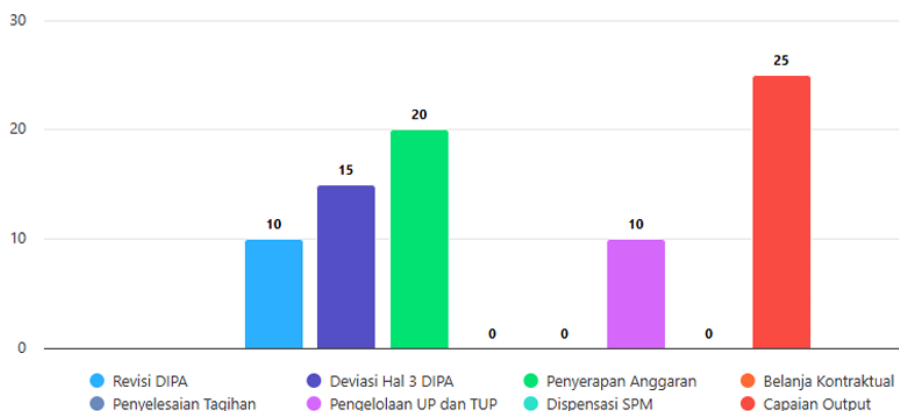
Nilai kerja pelaksanaan anggaran adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Nilai IKPA dihitung berdasarkan tiga aspek, yaitu: Kualitas perencanaan anggaran, Kualitas pelaksanaan anggaran, Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Setiap aspek memiliki indikator yang berbeda-beda. Misalnya, aspek kualitas perencanaan anggaran memiliki dua indikator, yaitu Revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Sementara itu, aspek kualitas pelaksanaan anggaran memiliki lima indikator, yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Nilai IKPA dirilis secara berkala setiap tanggal 15 bulan berikutnya melalui OMSPAN masing-masing Satker. Pimpinan dapat memantau perkembangan kegiatan satuan kerja secara berkala.

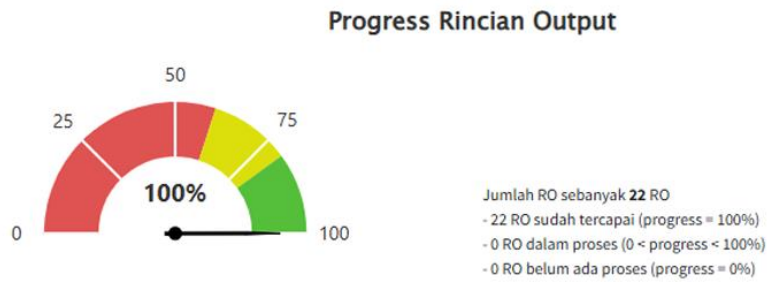
### Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran





Untuk Progres Rincian Output adalah sebagai berikut:

Progres Rincian Output



100.00 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Kanwil djkn kalimantan selatan dan tengah

Pagu anggaran dan realisasi anggaran saling terkait dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Berikut adalah penjelasan terkait hal tersebut:

### Pagu anggaran

Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada suatu unit kerja atau program. Pagu anggaran ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

### Realisasi anggaran

Pengeluaran yang sudah terjadi dan mengukur sejauh mana anggaran yang telah dianggarkan telah digunakan. Realisasi anggaran disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

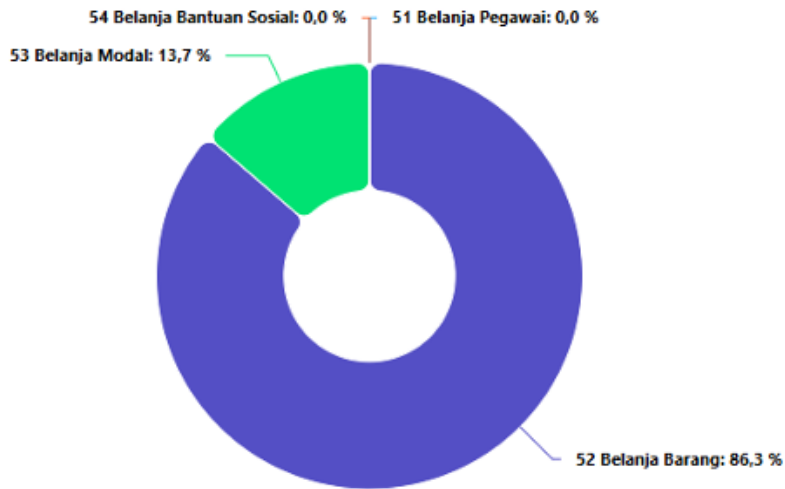
Pagu anggaran membatasi penggunaan anggaran, sedangkan realisasi anggaran mencatat penggunaan anggaran secara aktual.

### Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

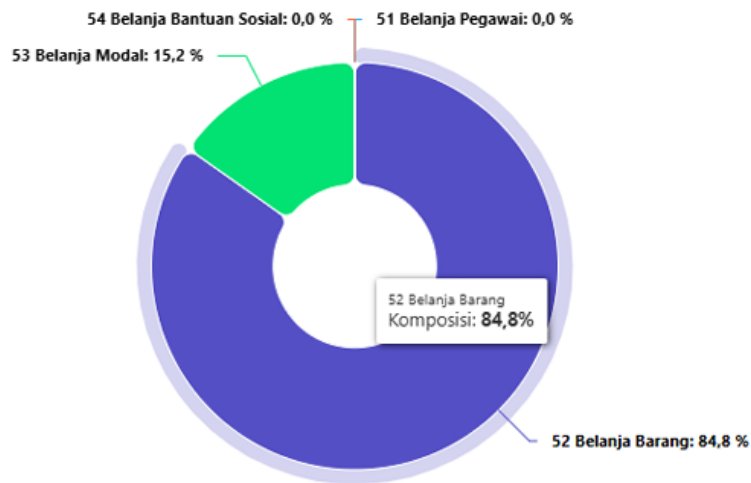
Akun 2 Digit	↑↓	Alokasi Anggaran	↑↓	Realisasi Anggaran	↑↓	Persentase	↑↓
51 Belanja Pegawai		0		0		nan %	
52 Belanja Barang		3.041.420.000		2.453.632.733		80.67 %	
53 Belanja Modal		546.338.000		389.166.399		71.23 %	
57 Belanja Bantuan Sosial		0		0		0.00 %	



### Komposisi Realisasi Anggaran



### Komposisi Alokasi Anggaran



Berikut ini adalah tabel Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Desember 2025



**LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
 Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

No	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	KANWIL DJKN KST	Nilai	100	100	100	0	0	100	100	80	80%	0	100
		Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
		Nilai Akhir	10	15	20	0	0	10	25				
		Nilai Aspek	100		100				100				
2	KPKNL PALANGKARAYA	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	0	100
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Aspek	100		100				100				
3	KPKNL PANGKALAN BUN	Nilai	100	100	99.63	100	100	99.96	100	99.92	100%	0	99.92
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10	15	19.93	10	10	10	25				
		Nilai Aspek	100		99.9				100				
4	KPKNL BANJARMASIN	Nilai	100	100	100	0	0	100	100	80	80%	0	100
		Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
		Nilai Akhir	10	15	20	0	0	10	25				
		Nilai Aspek	100		100				100				

LAPORAN CAPAIAN IKU INDEKS KINERJA ANGGARAN SATKER KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH S.D. TRIWULAN IV 2024

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggara			Capaian s.d. Triwulan IV
<b>A. Nilai IKPA</b>			<b>100,00%</b>
1	Revisi DIPA		10,00%
2	Deviasi Halaman III DIPA		15,00%
3	Belanja Kontraktual		0%
4	Pengelolaan UP dan TUP		10,00%
5	Penyerapan anggaran		10,00%
6	Penyelesaian Tagihan		10,00%
7	Capaian Output		25,00%
8	Dispensasi SPM (Pengurang)		0,00%
<b>B. Nilai SMART</b>			<b>100,00%</b>
<b>Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan IV</b>			<b>100,00%</b>

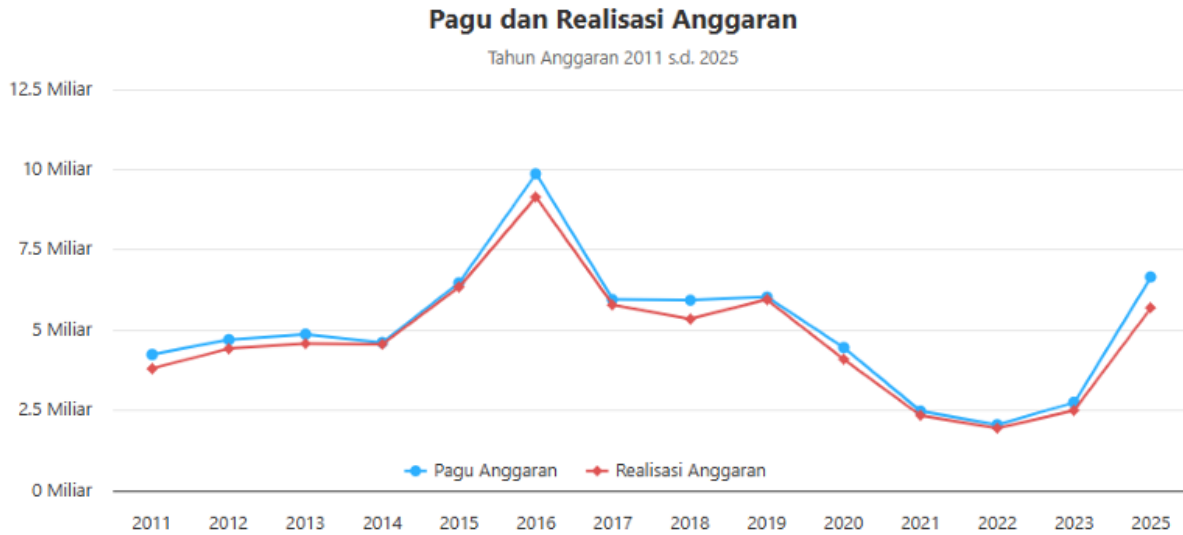
**C. Analisa atas Efisiensi Sumber Daya**

Dalam pencapaian sasaran strategis tentunya diperlukan berbagai sumber daya yang menunjang dalam pelaksanaannya, salah satunya dalam hal terkait dana/anggaran. Dalam perencanaan kegiatan anggaran dana menjadi hal penting yang harus diperhitungkan. Dalam pengelolaan anggaran, perlu menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Pengelolaan anggaran dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara



transparan. Selain itu tentunya akan menjadi lebih baik apabila pencapaian kegiatan dapat diraih dengan mengedepankan efisiensi anggaran.

Adapun realisasi anggaran pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebagai berikut:



#### Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	↑↓	Alokasi Anggaran	↑↓	Realisasi Anggaran	↑↓	Persentase	↑↓
51 Belanja Pegawai		0		0		nan %	
52 Belanja Barang		3.041.420.000		2.453.632.733		80.67 %	
53 Belanja Modal		546.338.000		389.166.399		71.23 %	
57 Belanja Bantuan Sosial		0		0		0.00 %	

Dari grafik dan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dari target yang telah ditetapkan. Meskipun alokasi anggaran tidak digunakan secara menyeluruh, namun pencapaian kinerja dapat maksimal melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Bentuk nyata dari pelaksanaan efisiensi ini adalah pelaksanaan kegiatan/acara secara daring (*online*). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Kalimantan dan Selatan dan Tengah adalah sebagai berikut:

#### **Optimalisasi media digital dalam kegiatan rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis**

Selama 2025, Bidang Lelang Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah telah menginisiasi berbagai kegiatan seperti edukasi dan komunikasi lelang, rapat koordinasi bertajuk DULANG INTAN, pembinaan kepada Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, *Business Matching* Lelang Seretak Harat Banar, rapat koordinasi dengan Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan, serta kegiatan



lain yang semuanya dilaksanakan secara daring melalui media *Ms.Teams* dan atau *Zoom Meeting*. Hal tersebut dengan tujuan utama efisiensi anggaran baik anggaran konsumsi, belanja bahan, transportasi, hingga efisiensi belanja perjalanan dinas.



Sejalan dengan program kerja Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah khususnya di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang PKN dalam melakukan koordinasi kepada stakeholder dan bimbingan kepada KPKNL di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan tengah menitikberatkan pelaksanaannya secara daring, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk Bincang Aset, yang dalam tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak delapan kali. Upaya tersebut telah berhasil mewujudkan efisiensi anggaran baik anggaran konsumsi, belanja bahan, transportasi, hingga efisiensi belanja perjalanan dinas.



Untuk Bidang Penilaian pada saat mengajukan permohonan penerbitan Surat Tugas, Penilai pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melakukan verifikasi atas permohonan penilaian untuk melihat jumlah dan lokasi objek penilaian berada. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan rute pelaksanaan dan jumlah hari pelaksanaan survei lapangan sehingga pelaksanaan survei dan penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan efisien. Selain itu pelaksanaan acara LOGIN juga dilaksnakan secara daring sebagai wujud dari bentuk efisiensi anggaran.



### **Berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu dalam Penggunaan Anggaran**

Beberapa kegiatan seperti Lelang Serentak Harat Banar Semester I dan Lelang Serentak Harat Banar Semester II 2025 dilaksanakan dengan kolaborasi bersama Kemenkeu Satu. Kolaborasi ini sekaligus dilaksanakan juga dengan kontribusi anggaran Kemenkeu Satu - *Joint Program* Penerimaan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini memberikan dampak ganda yakni guna mensukseskan kegiatan Lelang Serentak Harat Banar dengan efisiensi anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah serta mengoptimalkan serapan anggaran dan realisasi pelaksanaan program kerja *Joint Program* Penerimaan Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan.

## **D. Kinerja Lain-lain**

### **1. Penghargaan**

- a. Pada tahun 2025 Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah kembali memperoleh apresiasi dan penghargaan atas keberhasilannya memperoleh predikat 'informatif' sebagai Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025. Predikat ini diperoleh setelah PPID Tingkat II Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyelesaikan seluruh tahapan monitoring dan evaluasi keterbukan informasi publik tahun 2025 yang meliputi verifikasi SAQ serta penilaian saat presentasi dan wawancara. Predikat informatif diberikan kepada unit kerja yang memperoleh nilai akhir dengan rentang nilai 90 s.d. 100.



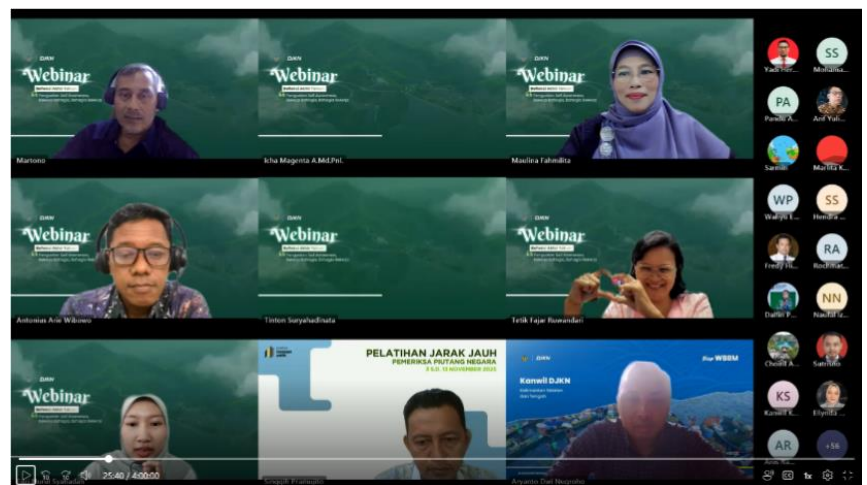
- b. Apresiasi juga diberikan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah atas kinerjanya sebagai konten Instagram Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kreativitas dalam pembuatan konten media sosial



Instagram yang telah turut meningkatkan citra positif institusi melalui penyampaian informasi yang kreatif, informatif, dan sesuai dengan pedoman pengelolaan komunikasi di lingkungan DJKN periode Semester I Tahun Anggaran 2025.



- c. Kamis 4 Desember 2025 Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyelenggarakan Webinar sebagai Refleksi Akhir Tahun dengan mengambil tema 'Penguatan Self Awereness, Bekerja Bahagia, Bahagia Bekerja'. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dengan menghadirkan narasumber yang kompeten yaitu Ibu Maulina Fahmilita sebagai Psikolog dan *Personal Development Expert*.



- d. Asset Talk Bidang PKN merupakan salah satu rangkaian acara dari puncak Ulang Tahun Kekayaan Negara Ke-19 Tahun 2025. Dilaksanakan pada tanggal 19 November 2025 dengan mengambil tema Aset Negara Untuk Anak Bangsa, Bedah Tuntas Sekolah Rakyat. Nara sumber pada kegiatan ini menghadirkan Yadi Muchtar, AKS, MPS, Sp. selaku Kepala BBPPKS Banjarmasin dan Rifki Hakim Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru.

Peserta Aset Talk dapat hadir secara daring melalui zoom meeting maupun secara *live Youtube*.



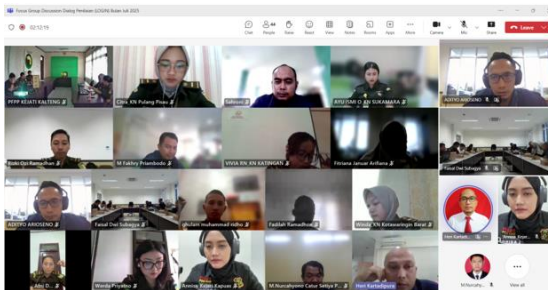
- e. Kegiatan Aset Talk Tahun 2025 pada Bidang Penilaian dilaksanakan secara daring melalui media Zoom dan Youtube dengan mengangkat materi "Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Potensi Penerimaan Negara/Daerah melalui Pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Narasumber kegiatan ini yaitu Bayu Firdaus selaku Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Madya Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan M. Haris Arsyad selaku Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Provinsi Kalsel dan sebelumnya merupakan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



- f. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Direktorat Penilaian, KPKNL Pangkalan Bun, KPKNL Palangkaraya, serta KPKNL Banjarmasin berkolaborasi melaksanakan kegiatan penilaian Sumber Daya Alam (SDA) di Taman Nasional Tanjung Puting pada tanggal 18–26 September 2025. Penilaian SDA hayati pada kawasan hutan konservasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis (IS) Kementerian Keuangan sekaligus proyek unggulan DJKN tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran nilai ekonomi jasa ekosistem yang disediakan oleh hutan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).



- g. Dialog Penilaian (LOGIN) merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan oleh Bidang Penilaian dalam rangka mewujudkan bentuk kolaborasi antar unit kerja dengan tujuan mengasah kompetensi, pengetahuan dan meningkatkan koordinasi para Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh para PFPP pada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan PFPP pada Instansi Pengguna seperti Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.



- h. Bidang Penilaian dan PFPP Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk berbagai tujuan, meliputi Pencatatan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas objek berupa tanah, Penilaian Sewa BMD atas Pemanfaatan Tanah, serta penilaian pemindahtanganan BMD dengan tindak lanjut penjualan kendaraan perorangan.





- i. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan tata kelola digital di bidang Penilaian, Direktorat Penilaian melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) DJKN di lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang dihadiri secara luring oleh para PFPP pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan KPKNL Banjarmasin serta secara daring oleh para PFPP pada KPKNL Palangkaraya dan KPKNL Pangkalan Bun.



- j. Dalam rangka memperkenalkan rencana pembangunan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) sekaligus menjaring masukan strategis dari Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan, Direktorat Penilaian mengadakan kegiatan Focus Group Discussion dengan mengundang Para Pimpinan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah di wilayah Kalimantan Selatan.



- k. Untuk memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan DKPB tahun 2026 akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, Bidang Penilaian dan Para PFPP pada Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan verifikasi dan sinkronisasi hasil survei dan pengolahan data DKPB.



- I. Inisiatif melaksanakan rangkaian bimbingan teknis terkait mekanisme lelang aset desa  
Lelang aset desa merupakan salah satu jenis lelang baru yang diperkenalkan di PMK 122 Tahun 2023 dalam mengakomodir mekanisme pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa. Dari koordinasi pada awal Tahun 2025 yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, diperoleh informasi bahwa sejak pertama kali APBDes diterapkan pada 2015, belum terdapat lelang aset desa yang dilaksanakan. Hal tersebut mengindikasikan potensi besar yang bisa didapatkan dari lelang aset desa. Menindaklanjuti informasi dimaksud, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah mulai mengadakan kegiatan edukasi dan komunikasi dengan tema lelang aset desa di Bulan Mei 2025, dan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan bimbingan teknis serupa yang dilaksanakan pada periode berikutnya sepanjang Tahun 2025 dengan melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kabupaten, BKP, Kantor Pusat DJKN, dan KPKNL. Kegiatan ini sekaligus untuk membantu Pemerintah Desa dalam memastikan siklus pengelolaan aset desa berjalan dengan optimal dan akuntabilitas pelaporan keuangan terjaga dengan baik.





m. Pelaksanaan Lelang Serentak Aset Desa Pertama di Indonesia

Pada tanggal 10 Oktober 2025 Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan Lelang Serentak Aset Desa bertajuk Lelang Serentak Serentak Harat Banar, dimana dalam kegiatan tersebut 13 (tiga belas) desa di Provinsi Kalimantan Selatan terlibat aktif dalam melelang aset desa masing-masing. Melalui kegiatan ini Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja yang pertama menyelenggarakan Lelang Serentak Aset Desa di-Indonesia.



n. Kolaborasi dengan Perbankan dalam Pemasaran Lelang

Pada tanggal 19-21 Desember 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan *Borneo Fair* dimana salah satu *booth* dalam *event* dimaksud diisi oleh tim Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dengan menghadirkan berbagai informasi yang dapat membantu masyarakat umum terkait pendaftaran, mekanisme pengajuan usulan, penawaran, dll. terkait lelang. Pada *event* dimaksud juga terdapat sesi diskusi khusus terkait lelang dengan menghadirkan perwakilan pegawai Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan Pejabat Lelang dari KPKNL Banjarmasin.



m. Bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan lelang aset desa

Pada Tahun 2025 Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menggalakkan pelaksanaan bimbingan teknis mekanisme lelang aset desa dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Seluruh desa di provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah berhasil diundang dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan dan dilanjutkan dengan pendampingan persiapan berkas usulan dan pelaksanaan lelang. Hasilnya, pada 10 Oktober 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berhasil melaksanakan Lelang Serentak Aset Desa pertama di Indonesia yang berkontribusi pada pencapaian target kinerja lelang secara umum.



n. Peningkatan intensitas pembinaan dan koordinasi dengan Balai Lelang

Sebagai respon atas peningkatan target pokok lelang dan PNBP lelang di Tahun 2025, salah satu strategi yang diterapkan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai upaya pencapaian target adalah dengan meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada Balai Lelang baik yang telah membuka perwakilan di Provinsi Kalimantan Selatan



dan Provinsi Kalimantan Tengah maupun yang belum. Hal tersebut salah satunya untuk menarik minat Balai Lelang baru untuk turut terlibat menggarap potensi pelaksanaan lelang yang ada, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya, Bali Lelang Serasi membuka *Pool* di Provinsi Kalimantan Tengah serta Balai Lelang Mitra Solusi Lelang juga turut melaksanakan lelang kendaraan di Provinsi Kalimantan Tengah sejak bulan Juli 2025.



o. Pelaksanaan Asset Talk dengan tema Lelang

Berbagai upaya edukasi terkait mekanisme lelang kepada masyarakat/stakeholders telah dilaksanakan pada Tahun 2025, salah satunya pada event Asset Talk dimana terdapat 2 tema utama yang disajikan yakni “Lelang Aset Desa: Solusi Transparan dan Akuntabel dalam Pengelolaan Aset Desa” dan “Menuju Ekosistem Lelang Modern: Optimalisasi lelang.go.id Generasi 2 untuk Keamanan Data dan Fitur yang Lebih Baik”. Melalui kegiatan ini diharapkan tingkat pemahaman pada masyarakat/stakeholders terkait mekanisme lelang dapat semakin meningkat dan kedepannya diharapkan akan turun meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat/stakeholders dalam pelaksanaan lelang.





- p. Untuk mendukung IKU Persentase Kualitas Data Pengurusan Piutang Macet, KPKNL pada lingkup Kanwil DJKN Kalimantan dan Tengah telah melaksanakan kegiatan stock opname Berkas Piutang Macet sesuai monitoring Kantor Pusat DJKN (Dit. PKKN) yang diuraikan sebagaimana berikut:

No	Unit Kerja	Realisasi Stock Opname BKP		
		Target	Realisasi	%
1.	KPKNL Palangka Raya	16	16	100%
2.	KPKNL Pangkalan Bun	12	12	100%
3.	KPKNL Banjarmasin	70	70	100%
Kanwil DJKN KST		98	98	100%

- q. Untuk mendukung IKU Persentase Rekonsiliasi Data Piutang Negara yang diurus PUPN, KPKNL pada lingkup Kanwil DJKN Kalimantan dan Tengah telah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data piutang dengan Penyerah Piutang sesuai monitoring Kantor Pusat DJKN (Dit. PKKN) yang diuraikan sebagaimana berikut:

No	Unit Kerja	Realisasi Rekonsiliasi Data Piutang Negara		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
1.	KPKNL Palangka Raya	9	12	138,89%
2.	KPKNL Pangkalan Bun	9	18	208,33%
3.	KPKNL Banjarmasin	23	33	143,23%
Kanwil DJKN KST		40	63	156,25%

- n. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Palangkaraya

Dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga serta meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kedua pihak resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penagihan dengan Kegiatan Optimalisasi Piutang Daerah dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Pokok-pokok yang diperjanjikan dalam PKS mencakup:

- Penagihan piutang ≤ Rp8 juta yang tidak bisa diserahkan ke PUPN
- Asistensi verifikasi, edukasi, dan strategi penagihan
- Mekanisme penghapusan sesuai PMK 137/PMK.06/2022

Kegiatan ini juga memuat pemaparan implementasi optimalisasi piutang daerah oleh KPKNL Palangka Raya dan BPKAD Kota Palangka Raya sejak 2022, yang telah



membuahkan hasil nyata dalam peningkatan penerimaan dan penghapusan piutang sesuai ketentuan.



- o. Penggalian potensi pengurusan Piutang Daerah pada SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta konsultasi tindakan hukum terhadap permasalahan terkait Piutang Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 18 September 2025 di Aula Kantor BPKAD Kotawaringin Barat.



- p. Pada Senin, 8 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Tabalong ke-60, berlokasi di Halaman Pendopo Bersinar Kabupaten Tabalong, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penagihan melalui kegiatan Optimalisasi piutang daerah antara Bupati Kabupaten Tabalong Bapak Muhammad Noor Rifani dan Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, ibu Tetik Fajar Ruwandari, kegiatan penandatanganan ini merupakan rangkaian dari peringatan hari jadi Pemerintah Kabupaten Tabalong Ke-60 dan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhidin.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi dasar pelaksanaan kerja sama penagihan piutang daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022, nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama,



komunikasi dan kemitraan stratetfis dalam penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan piutang daerah serta percepatan pengurusan piutang daerah.

Nota Kesepahaman ini menunjukkan adanya kerjasama dan kemitraan strategis antara Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dalam rangka peningkatan pertukaran serta pengembangan informasi pengelolaan piutang daerah serta meningkatkan fungsi-fungsi pemeririntahan dalam rangka pembangunan serta peningkatan layanan publik.



q. Forum Konsultasi Publik (FKP)

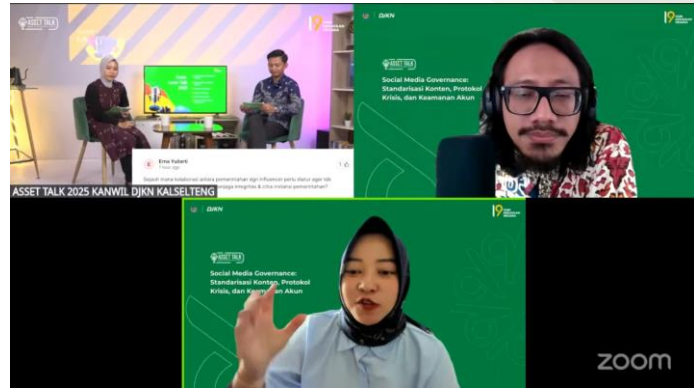
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 24 Juli 2025 di Aula Kanwil DJPb Kalimantan Selatan dan secara daring dengan media *Microsoft Teams Meetings*. Dalam pelaksanaanya Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berkolaborasi dengan KPKNL Palangka Raya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin dengan mengambil tema "Penyempurnaan Standar Pelayanan". Forum Konsultasi Publik diikuti oleh perwakilan dari unsur-unsur masyarakat antara lain: Pengguna Layanan, Akademisi/Praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media massa; Stakeholders lainnya. FKP menjadi sarana untuk menyampaikan informasi terkait layanan yang diberikan kepada stakeholders seperti pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), piutang negara, penilaian, dan lelang. Forum ini juga bertujuan untuk menyerap kritik, saran, maupun masukan dari berbagai unsur masyarakat, mengidentifikasi permasalahan. Sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan wadah dialog antara penyelenggaralayanan dan masyarakat yang digunakan untuk menyusun, menyesuaikan, dan mengevaluasi standar pelayanan.



- r. Pada hari Jumat 12 Desember 2025 telah dilaksanakan Talk Show “Soft Launching Antologi Integritas Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah” secara *hybrid* di Aula Antasari dan dengan menggunakan media *Microsoft Teams*. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi!” serta menyatukan semangat dan mengukuhkan komitmen Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah untuk memberantas korupsi dan mewujudkan Indonesia yang berintegritas. Sebelum pelaksanaan *Talk Show* telah dilaksanakan juga kegiatan *Integrity Fun Plogging* di Lapangan Murjani Banjarbaru.



- s. Dalam rangka memeriahkan Hari Kekayaan Negara ke 19, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (c.q. Seksi Informasi) berperan serta menyelenggarakan Asset Talk pada Hari Jumat 21 November 2025 melalui media *Zoom Meeting* serta *Live on Youtube*. Tema yang diambil pada kesempatan cukup menarik untuk disimak terkait *Social Media Governance: Standarisasi Konten, Protokol Krisis dan Keamanan Akun*. Nara sumber yang diundang juga cukup kompeten dibidangnya yaitu Risti Amalia Krisna (*Founder Apta Group & Ranahmedia*) dari pihak eksternal dan Fajri Andari (Kepala Seksi Direktorat hukum dan Humas DJKN).



## 2. Inovasi/Achievement

a. Laboratorium Aset merupakan forum komunikasi tatap muka antara Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dengan stakeholder di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Melalui forum Laboratorium Aset, digali seluruh permasalahan penatausahaan dan pengelolaan BMN yang dialami oleh stakeholder. Forum Laboratorium aset melibatkan lintas bidang, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan penatausahaan dan pengelolaan BMN secara komprehensif. Berikut adalah rincian pelaksanaan Laboratorium Aset selama tahun 2025.

### Laboratorium Aset Periode I 2025



Dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025, mengundang 4 Korwil Kementerian Pertanian lingkup Kalimantan Selatan, yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.



### Laboratorium Aset Periode II 2025



Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025, mengundang Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III.

### Laboratorium Aset Periode III 2025



Dilaksanakan pada tanggal 16 September 2025, mengundang tiga Korwil, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan.

### Laboratorium Aset Periode IV 2025



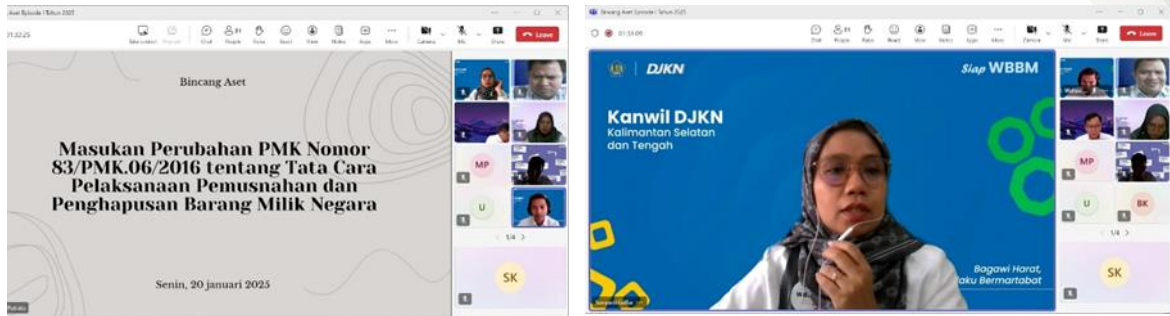
Dilaksanakan pada tanggal 16 September 2025 bertempat di Aula Antasari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, mengundang Lapas Kota Banjarmasin, Lapas Kota Banjarbaru, Lapas Perempuan Kota Banjarmasin, dan Lapas Anak Kota Banjarmasin.

- b. Selain Laboratorium Aset, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah membuat inovasi berupa Bincang Aset. Bincang Aset merupakan pengembangan dari inovasi dari



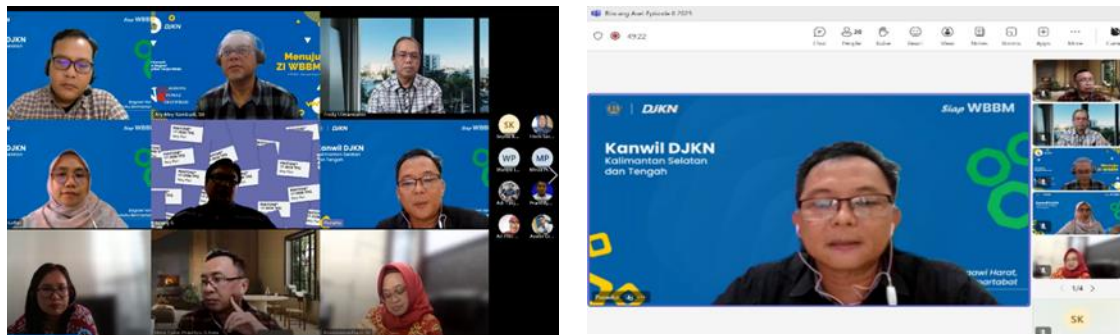
Laboratorium Aset. Bincang Aset dilakukan secara daring untuk menjangkau stakeholder secara lebih luas. Berikut adalah rincian pelaksanaan Bincang Aset selama tahun 2025.

### Bincang Aset Periode I Tahun 2025



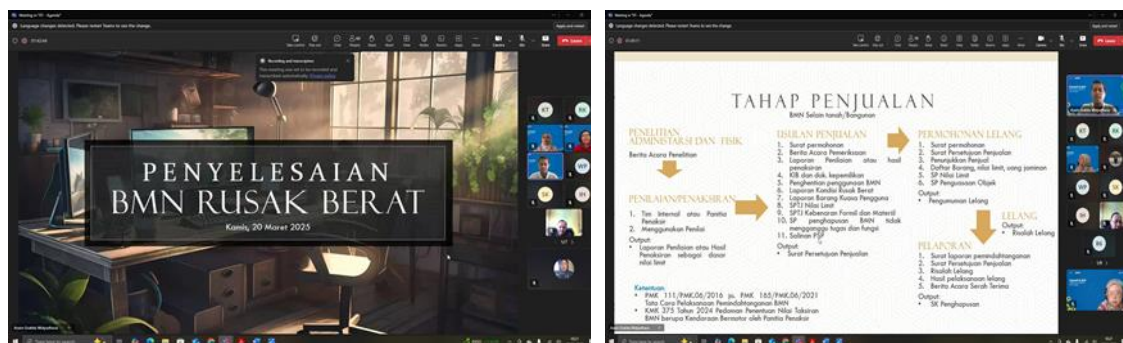
Bincang Aset Episode I Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025, dengan tema Masukan aas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui MsTeams, dengan peserta KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, serta satuan kerja.

### Bincang Aset Periode II Tahun 2025



Bincang Aset Episode II Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025, dengan tema strategi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui MsTeams, dengan peserta KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

### Bincang Aset Periode III Tahun 2025

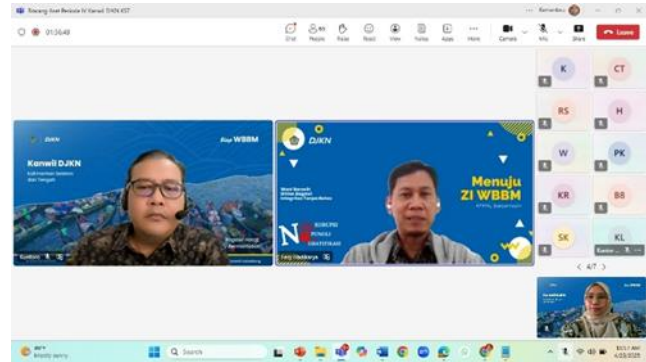




# LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

Bincang Aset Episode V Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025, dengan tema Sosialisasi Monitoring Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, diikuti peserta KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

## Bincang Aset Periode IV Tahun 2025



Bincang Aset Episode IV Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025, dengan tema *Current Issues* Optimalisasi Aset Guna Menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Efisiensi Biaya dan Akuntabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui MsTeams, dengan peserta KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, serta seluruh Koordinator Wilayah.

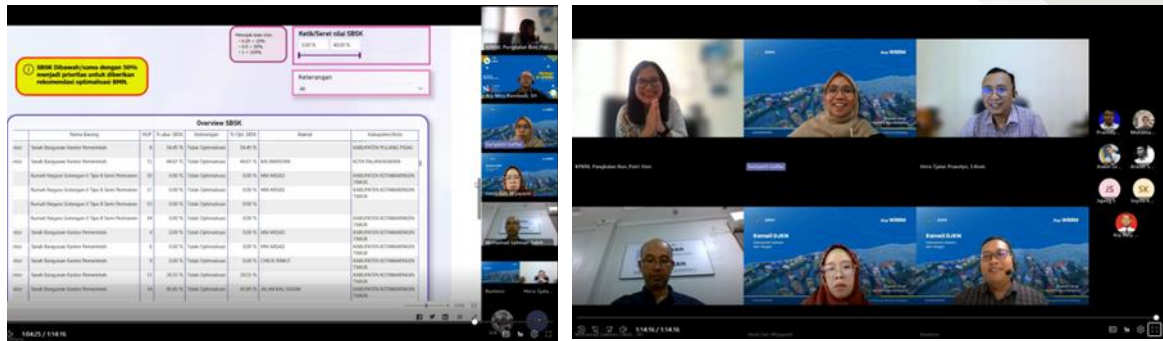
## Bincang Aset Periode V Tahun 2025



Bincang Aset Episode V Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025, dengan tema Sosialisasi Monitoring Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, diikuti peserta KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

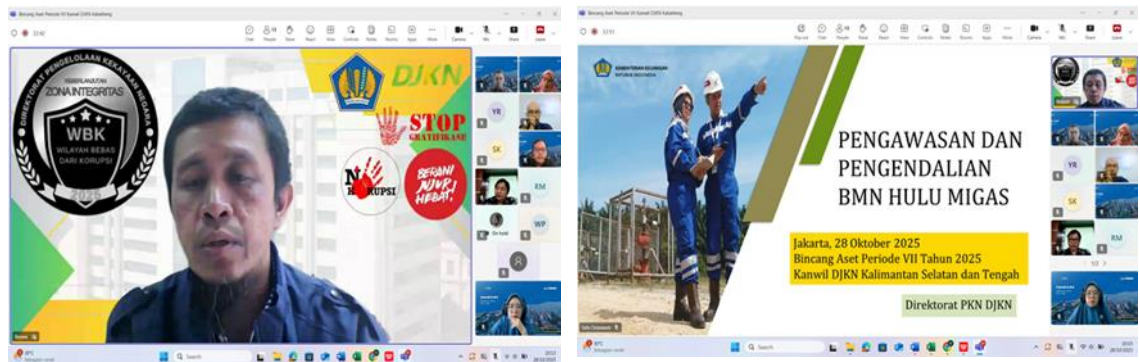


### Bincang Aset Periode VI Tahun 2025



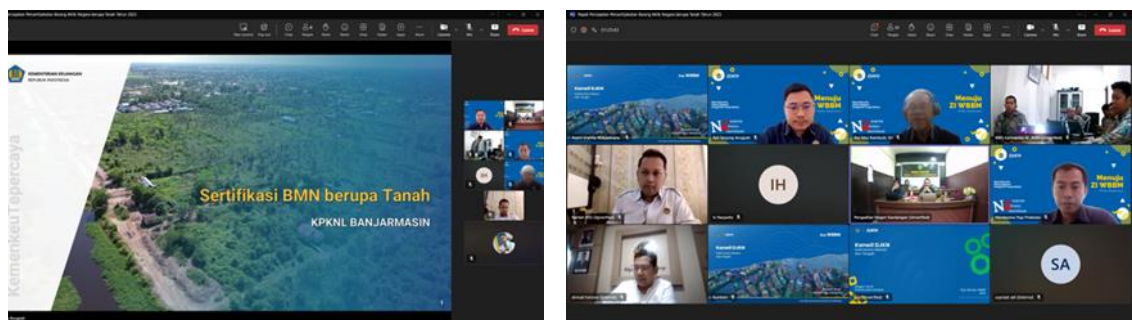
Bincang Aset Episode VI Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025, dengan tema Lelang Hak Menikmati atas Pemanfaatan BMN. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui MsTeams, dengan peserta KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

### Bincang Aset Periode VII Tahun 2025



Bincang Aset Episode VII Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025, dengan tema Wasdal dan Pengelolaan BMN Hulu Migas. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui MsTeams, dengan peserta KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, serta K3S.

### Bincang Aset Periode VIII Tahun 2025



- c. Login (Dialog Penilaian) diadakan atas dasar pemikiran bahwa diperlukan wadah untuk menguatkan sinergi Bersama anatar Kanwil DJKN dengan Fungsional Penilai di Kalimantan Selatan dan Tengah. Dilaksanakan secara rutian tiap bulan dengan membahas hal-hal sebagai berikut:



- 1) Pemantauan Progress capaian target di bidang penilaian
- 2) Diskusi terkait masalah/kendala di bidang penilaian
- 3) Sharing Knowledge peraturan/teknis Penilaian
- 4) Pembahasan Current Issue di bidang Penilaian

Kegiatan Dialog Penilaian mampu membawa dampak positif berupa peningkatan kompetensi PFPP dan berperan efektif sebagai sarana pembinaan antara Kanwil DJKN dengan Para Penilai di Lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah.



d. Lelang Serentak Harat Banar (LSHB)

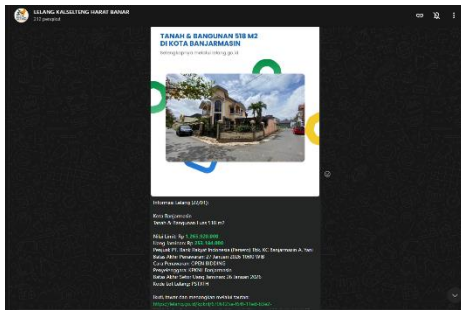
LSHB merupakan inovasi dari Bidang Lelang dalam rangka optimalisasi realisasi capaian lelang serta guna mendukung pengembangan UMKM dengan melaksanakan lelang serentak atas beberapa jenis objek lelang termasuk produk UMKM secara serentak. Pada Tahun 2025, LSHB dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada bulan Juni dan Oktober 2025, dengan menggandeng para stakeholders seperti perbankan, Balai Lelang, Kemenkeu Satu Kalsel dan Kalteng, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, serta satuan kerja Pemerintah Pusat.





e. Saluran Whatsapp Lelang Kalselteng Harat Banar

Merupakan inovasi dari Bidang Lelang berupa saluran whatsapp yang berisi berbagai informasi terkait pelaksanaan lelang di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, baik yang dilaksanakan oleh KPKNL maupun oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II. Inovasi berupa saluran whatsapp ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran lelang. Informasi yang disajikan merupakan objek lelang unggulan dari masing-masing KPKNL dan Balai Lelang yang sedang/akan dijual secara lelang baik melalui KPKNL maupun Balai Lelang di Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah.




- f. Pelaksanaan Kegiatan Diskusi bersama melalui Kupas PN. Kupas Piutang Negara (Kupas PN) merupakan inovasi di bidang peningkatan layanan Pengurusan Piutang Negara di lingkup Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Kupas PN dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan KPKNL Banjarmasin, KPKNL Palangka Raya, dan KPKNL Pangkalan Bun setiap bulannya. Dalam Kupas PN dibahas mengenai Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Piutang Negara, serta pembahasan current issue Piutang Negara. Dari pelaksanaan inovasi tersebut diperoleh hasil bahwa Rekonsiliasi data capaian mencapai tingkat akurasi 100% berkat konfirmasi langsung dari KPKNL yang bersangkutan. Mitigasi risiko dan manajemen risiko yang lebih baik berkat pembahasan current issue pada bidang Piutang Negara.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja atas perencanaan kerja, pelaksanaan tujuan serta sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyusun Laporan Kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kegiatan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sekaligus menjadi acuan bagi upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis yang terbagi dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang kesemuanya dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Pencapaian ini sekaligus menjadi kontribusi bagi pencapaian kinerja pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lebih lanjut, realisasi capaian target ini tidak hanya berdampak pada pencapaian individu/organisasi, namun lebih dari itu, realisasi atas kinerja yang telah dicapai juga memiliki manfaat yang terukur pada perekonomian, khususnya perekonomian regional di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi DJKN, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian DJKN dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



# Lampiran





**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-21/KN/2025**

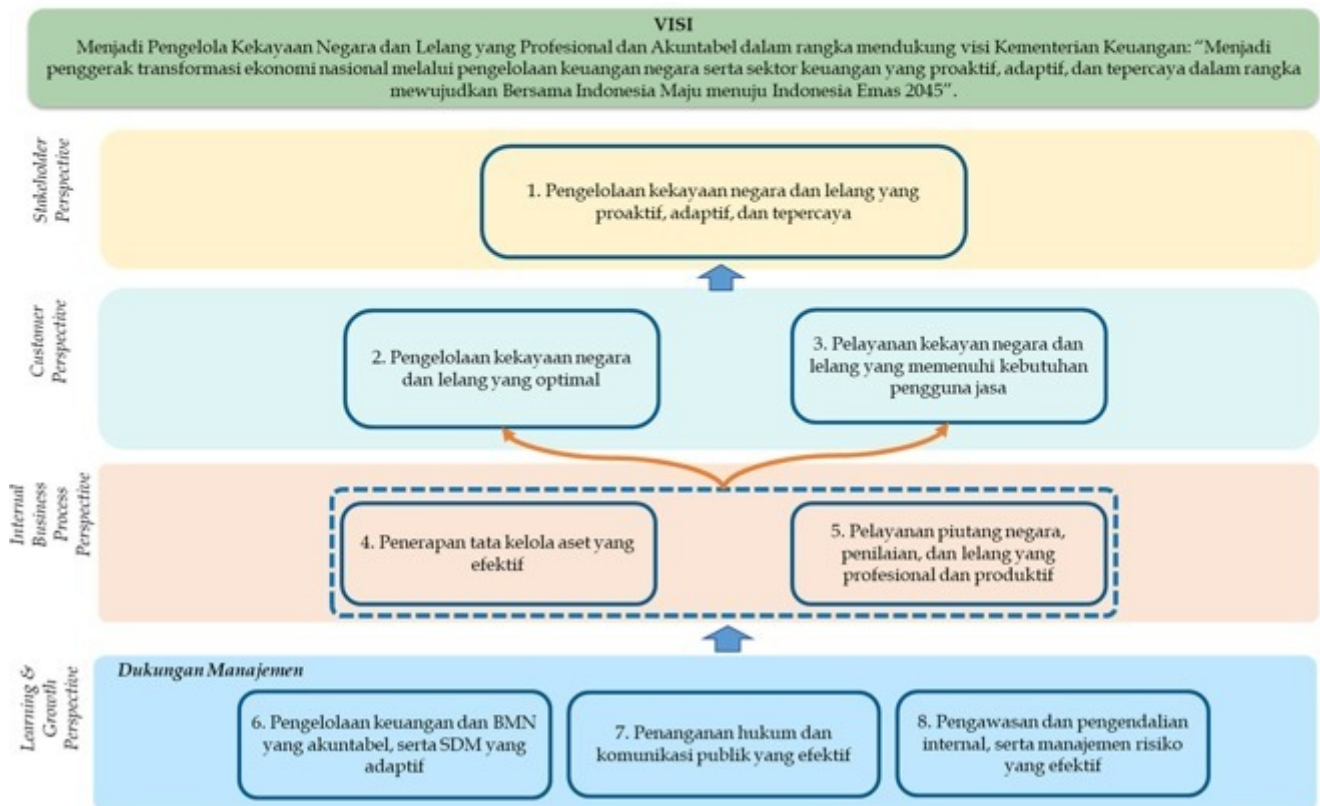
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp56,5 M)
		1b-CP Indeks integritas organisasi	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Persentase relisasi pokok lelang	100% (Rp981,9 M)
		2b-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,7 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%

**Program/Kegiatan 2025**

Program:

**Anggaran**



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp825,262,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp110,056,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp335,193,000
3. Pengelolaan Aset	Rp380,013,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp2,379,187,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp6,288,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,298,245,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp57,338,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp17,316,000

Kota Banjarbaru, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**  
**NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp56,5 M)
1b-CP	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Persentase relisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp981,9 M)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,7 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%

Kota Banjarbaru, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Banjarbaru, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Kusumawardhani		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19690823 199603 2 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp56,5 M)	Penerima Layanan
		Indeks integritas organisasi	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase relisasi pokok lelang	100% (Rp981,9 M)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,7 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



	kebutuhan pengguna jasa	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Banjarbaru, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban  
19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Kusumawardhani  
19690823 199603 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	130 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp56,5 M)
1b-CP	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Persentase relisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp981,9 M)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,7 M)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
<b>KONSEKUENSI</b>								



	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Kota Banjarbaru, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Kusumawardhani

19690823 199603 2 001





**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-21a/KN/2025**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp56,5 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp981,9 M)
		2b-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,835 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	100%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%

**Program/Kegiatan 2025**

Program:

**Anggaran**



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp825,262,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp110,056,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp335,193,000
3. Pengelolaan Aset	Rp380,013,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp2,379,187,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp6,288,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,298,245,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp57,338,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp17,316,000

Banjarbaru, 18 November 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tetik Fajar Ruwandari



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**  
**NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	-	-	-	-	-	100%	100% (Rp56,5 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	-	-	-	-	-	100%	100% (Rp981,9 M)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	-	-	-	-	100	100
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	-	-	-	-	-	100%	100% (Rp3,835 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	-	-	-	-	-	70	70
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	-	-	-	-	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	-	-	-	-	-	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	-	-	-	-	-	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	-	-	-	-	-	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	-	-	-	-	-	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	-	-	-	-	-	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	-	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	-	-	-	-	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	-	-	-	-	-	100	100
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	-	-	-	-	-	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	95.3%	95.3%

Banjarbaru, 18 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tetik Fajar Ruwandari



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Banjarbaru, 18 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tetik Fajar Ruwandari



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Tetik Fajar Ruwandari		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19760822 199503 2 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp56,5 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp981,9 M)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,835 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025*



	kebutuhan pengguna jasa	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	100%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Banjarbaru, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari  
19760822 199503 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban  
19660423 199010 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	129 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	-	-	-	-	-	100%	100% (Rp56,5 M)
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	-	-	-	-	-	100%	100% (Rp981,9 M)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	-	-	-	-	100	100
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	-	-	-	-	-	100%	100% (Rp3,835 M)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	77	77



3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	-	-	-	-	-	70	70
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	-	-	-	-	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	-	-	-	-	-	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	-	-	-	-	-	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	-	-	-	-	-	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	-	-	-	-	-	100%	100%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	-	-	-	-	-	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	-	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	-	-	-	-	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	-	-	-	-	-	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	-	-	-	-	-	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	95.3%	95.3%

#### KONSEKUENSI

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarbaru, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari  
19760822 199503 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban  
19660423 199010 1 001





**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-21/KN/2026  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2026**

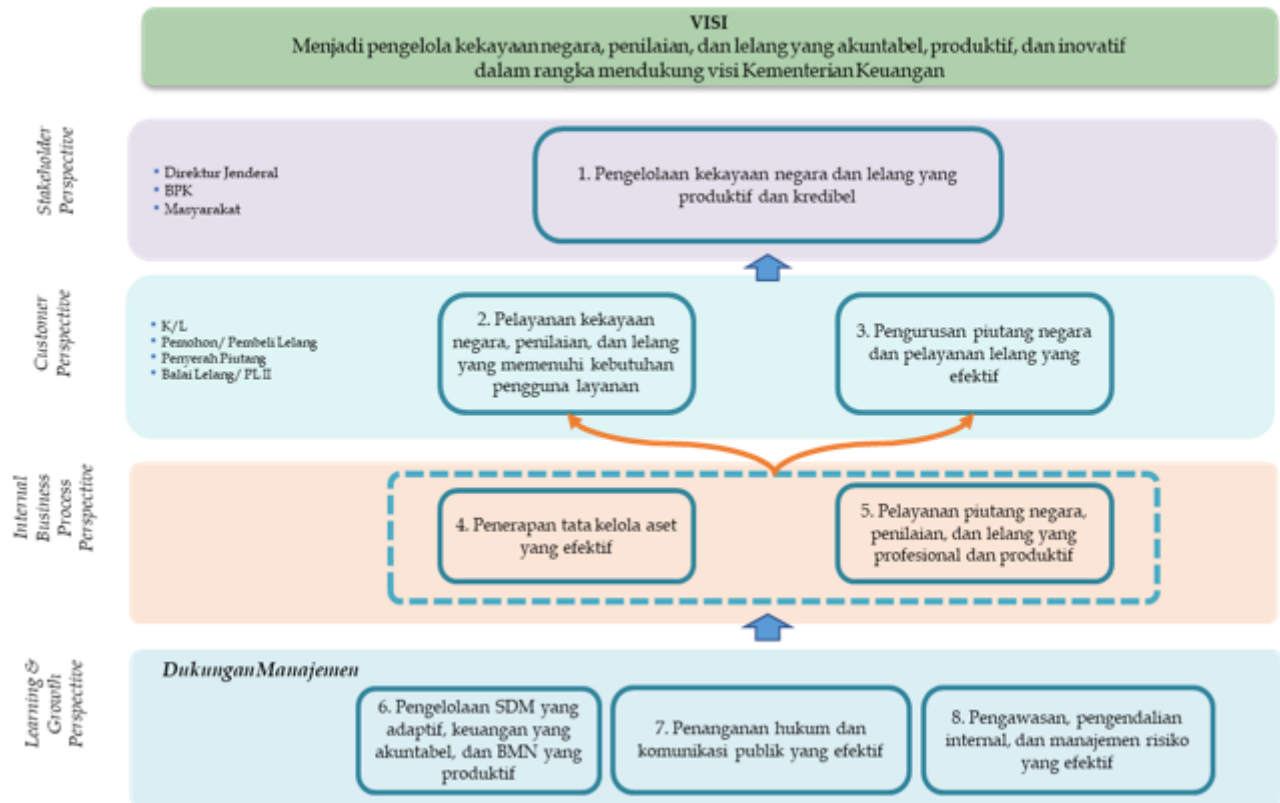
**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 47,6 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 1,9 M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 949 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

**Program/Kegiatan 2026**

**Anggaran**

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp911,733,000



Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp123,006,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp430,480,000
3. Pengelolaan Aset	Rp347,845,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp10,402,000

Program:

Program Dukungan Manajemen	Rp2,103,384,000
----------------------------	-----------------

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi	Rp19,059,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,018,107,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp56,198,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp10,020,000

Banjarbaru, Januari 2026

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tetik Fajar Ruwandari



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**  
**NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel</b>							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 47,6 M)
<b>2</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan</b>							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>3</b>	<b>Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 1,9 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 949 M)
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Banjarbaru, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tetik Fajar Ruwandari



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Banjarbaru, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan  
Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tetik Fajar Ruwandari



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Tetik Fajar Ruwandari		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19760822 199503 2 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 47,6 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
		Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 1,9 M)	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 949 M)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Banjarbaru, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari  
19760822 199503 2 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban  
19660423 199010 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	131 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 47,6 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 1,9 M)



3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 949 M)
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%	
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100	
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80	
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80	
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80	
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100	
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83	
<b>KONSEKUENSI</b>									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarbaru, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

19760822 199503 2 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*

